

**ANALISIS PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PEMERINTAH PADA BADAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH BONE BOLANGO**

Oleh :

ANGGI MUSTAPA

E11.21.018

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana**



**PROGRAM SARJANA
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
GORONTALO
2025**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PEMERINTAH PADA BADAN
KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
BONE BOLANGO**

Oleh

Anggi Mustapa

E1121018

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian

Guna memperoleh gelar sarjana

Dan telah disetujui oleh tim pembimbing pada tanggal

Gorontalo.....2025

Pembimbing I



Rizka Yunika Ramly, SE., M.Ak
NIDN. 0924069002

Pembimbing II



Kartini Muslimin, SE., M.Ak
NIDN. 0913127601

Mengetahui

Ketua Program Studi Akuntansi



Shella Budiawan, SE., M.Ak
NIDN. 0921089202

HALAMAN PERSETUJUAN

ANALISIS PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PEMERINTAH PADA BADAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH BONE BOLANGO

Oleh

ANGGI MUSTAPA
E.11.21.018

Diperiksa Oleh Dewan Penguji Strata Satu (S1)
Universitas Ichsan Gorontalo
Gorontalo.....2025

1. Dr. Marten Puyo, SE., M.Ak

(Ketua Penguji)

2. Marina Paramitha S. Piola, SE., M.Ak

(Anggota Penguji)

3. Shella Budiawan, SE., M.Ak

(Anggota Penguji)

4. Rizka Yunika Ramly, SE., M.Ak

(Pembimbing Utama)

5. Kartini Muslimin, SE., M.Ak

(Pembimbing Pendamping)

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi


Dr. M. Safir, SE., M.Si
NIDN. 0928116901

Ketua Program Studi


Shella Budiawan, SE., M.Ak
NIDN. 0921089202

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyetakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana) baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun di perguruan Tinggi lain.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri dengan arahan dari Tim Pembimbing.
3. Dalam Skripsi tidak terdapat karya yang telah publikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Gorontalo, Maret 2025
Yang membuat pernyataan



ANGGI MUSTAPA
E11.21.018

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Tidak ada mimpi yang terlalu tinggi. Tak ada mimpi yang patut untuk diremehkan. Lambungkan setinggi yang kau inginkan dan gapailah dengan selayaknya yang kau harapkan”

-Maudy Ayunda-

“setiap tetes keringat orang tuaku adalah ribuan Langkahku untuk terus maju”

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk kedua orang yang berarti di hidup saya. Bapak Joni Mustapa dan Ibu Linda Halid dua orang yang sangat berjasa di hidup saya yang selalu mengusahkan anak semata wayangnya menempuh pendidikan setinggi-tingginya meskipun mereka berdua hanya bisa menempuh pendidikan sampai tahap dasar. Kepada Bapak saya terimakasih setiap cucuran keringat dan kerja keras yang engkau tukarkan menjadi sebuah nafkah demi anakmu dapat mengenyam pendidikan sampai ke Tingkat ini. Untuk surgaku ibu saya, terimakasih atas segala motivasi, pesan, doa dan harapan yang selalu mendampingi setiap Langkah dan ikhtiar anakmu untuk menjadi seseorang yang berpendidikan, terimakasih atas kasih sayang tanpa batas yang tak pernah lekang oleh waktu, atas kesabaran dan pengorbanan yang selalu mengiringi perjalanan hidup saya, terimakasih telah menjadi sumber kekuatan dan inspirasi, serta pelita yang tak pernah padam dalam Langkah yang saya tempuh. Terakhir, terima kasih atas segala hal yang kalian berikan yang tak terhitung jumlahnya.

ABSTRACT

ANGGI MUSTAPA. E1121018. THE ANALYSIS OF REGIONAL GOVERNMENT REVENUE AND EXPENDITURE AT THE REGIONAL FINANCE AND REVENUE AGENCY OF BONE BOLANGO

This study aims to analyze regional revenue and expenditure at the Regional Finance and Revenue Agency of Bone Bolango using four financial ratios: the revenue variance ratio, local revenue effectiveness ratio, expenditure variance ratio, and expenditure efficiency ratio. The data for this study consists of financial ratio calculations from the past three years and interviews with relevant stakeholders. The findings indicate that the revenue variance ratio improved year by year, with revenue realization increasingly approaching the target. The local revenue effectiveness ratio increased from 80% in 2021 to 103% in 2023, reflecting the local government's success in optimizing local revenue. The expenditure variance ratio demonstrates that regional expenditures had not been fully absorbed. However, it showed some improvement, increasing from 14% in 2022 to -5% in 2023. The expenditure efficiency ratio fluctuated over the years, yet it remained high, reaching 94% in 2023, indicating that the majority of the budget had been utilized effectively.

Keywords: local revenue, local expenditure, financial ratio, effectiveness, efficiency



ABSTRAK

ANGGI MUSTAPA. E1121018. ANALISIS PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PEMERINTAH PADA BADAN KEUNGAN DAN PENDAPATAN DAERAH BONE BOLANGO

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pendapatan dan belanja daerah pada Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Bone Bolango dengan menggunakan empat rasio keuangan, yaitu rasio varians pendapatan, rasio efektivitas pendapatan asli daerah (PAD), rasio varians belanja, dan rasio efisiensi belanja. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi hasil perhitungan rasio keuangan selama tiga tahun terakhir serta wawancara dengan pihak terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rasio varians pendapatan mengalami perbaikan dari tahun ke tahun, dengan realisasi pendapatan mengalami perbaikan dari tahun ke tahun, dengan realisasi pendapatan yang semakin mendekati target. Rasio efektivitas PAD meningkat dari 80% pada 2021 menjadi 103% pada 2023, menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah dalam optimalisasi pemerintah asli daerah. Rasio varians belanja menunjukkan bahwa belanja daerah masih belum sepenuhnya terserap dengan baik, meskipun terdapat peningkatan dari 14% pada 2022 menjadi -5% pada 2023. Sementara itu, rasio efisiensi belanja mengalami fluktuasi, dengan tingkat efisiensi belanja mengalami fluktuasi, dengan tingkat efisiensi yang tetap tinggi, mencapai 94% pada 2023, menandakan bahwa sebagian besar anggaran telah digunakan secara optimal.

Kata kunci: pendapatan daerah, belanja daerah, rasio keuangan, efektivitas, efisiensi

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul “Analisis Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Pada Badan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Bone Bolango”. Penelitian ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar sarjana pada program studi Akuntansi Universitas Ichsan Gorontalo.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan penelitian ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis menerima, mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun kearah perbaikan demi kesempurnaan penelitian ini. Penyusunan penelitian ini, penulis mengalami berbagai kesulitan dan hambatan, namun berkat Rahmat dan petunjuk dari Allah SWT serta dukungan dan sumbangan pemikiran dari segenap pihak, terutama bimbingan dari dosen pembimbing serta dorongan dan doa dari kedua orang tua yang penulis rasakan selama ini atas jasa-jasa yang diberikan secara tulus ikhlas, dalam usaha mencari kesempurnaan dan manfaat dari penelitian ini maka semua kesulitan dan hambatan tersebut dapat teratasi.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada Muhamad Ichsan Gaffar, SE., M.Ak, selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Tehnologi (YPIPT) Ichsan Gorontalo, Dr. Gaffar, M.Si selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo. Dr. Musafir, SE., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi, dan Ibu Shella Budiawan, SE., M.Ak selaku Ketua Jurusan

Akuntansi. Ibu Rizka Yunika Ramly, SE., M.Ak selaku Pembimbing I yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama mengerjakan penelitian ini. Ibu Kartini Muslimin, SE., M.Ak selaku pembimbing II yang telah banyak membantu dan membimbing hingga penelitian ini dapat selesai, Bapak dan Ibu dosen yang telah mendidik dan membimbing penulis selama ini, serta teman-teman mahasiswa Jurusan Akuntansi angkatan 2021 yang tidak bisa sebut namanya satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan dan motivasi dalam proses penyusunan penelitian ini.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis berharap semoga bantuan, bimbingan dan arahan yang telah diberikan oleh berbagai pihak akan memperoleh imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Aamiin.

Gorontalo, Maret 2025

ANGGI MUSTAPA
E11.21.018

DAFTAR ISI

Halaman

| | |
|-----------------------------|------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | ii |
| PERNYATAAN..... | iii |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN | iv |
| ABSTRAK | v |
| ABSRTACT..... | vi |
| KATA PENGANTAR | vii |
| DAFTAR ISI..... | viii |
| DAFTAR TABEL..... | ix |
| DAFTAR GAMBAR | x |
| DAFTAR GRAFIK..... | xi |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|---------------------------------------|---|
| 1.1 Latar Belakang Penelitian | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 5 |
| 1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian..... | 5 |
| 1.3.1 Maksud Peneliian | 5 |
| 1.3.2 Tujuan Penelitian | 6 |
| 1.4 Manfaat Penelitian | 6 |

BAB II KAJIAN TEORITIS PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

| | |
|---|----|
| 2.1 Kajian Teoritis..... | 8 |
| 2.1.1 Anggaran Sektor Publik | 8 |
| 2.1.2 Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) | 9 |
| 2.1.3 Anggaran Partisipatif | 10 |
| 2.1.4 Manajemen Keuangan Daerah | 10 |
| 2.1.5 Akuntansi Sektor Publik | 11 |
| 2.1.6 Pendapatan Asli Daerah | 12 |
| 2.1.7 Belanja Daerah | 16 |
| 2.1.8 Belanja Modal | 17 |

| | |
|---|----|
| 2.1.9 Jenis-jenis Belanja Modal | 18 |
| 2.1.10 Laporan Realisasi Anggaran | 20 |
| 2.1.11 Analisis Pendapatan dan Belanja Daerah | 21 |
| 2.1.12 Penelitian Terdahulu | 26 |
| 2.2 Kerangka Pemikiran..... | 28 |

BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN

| | |
|---|----|
| 3.1. Objek Penelitian | 29 |
| 3.2. Metode Penelitian Yang Digunakan | 29 |
| 3.2.1 Operasionalisasi Variabel | 29 |
| 3.2.2 Jenis dan Sumber Data..... | 30 |
| 3.2.3 Informan Penelitian..... | 32 |
| 3.2.4 Teknik Pengumpulan Data..... | 32 |
| 3.2.5 Metode Analisis Data..... | 34 |

BAB IV GAMBARAN LOKASI PENELITIAN, HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|---|----|
| 4.1 Gambaran Lokasi Penelitian | 36 |
| 4.1.1 Sejarah Lokasi Penelitian | 36 |
| 4.1.2 Visi dan Misi | 37 |
| 4.1.3 Struktur Organisasi | 38 |
| 4.2 Hasil Penelitian | 39 |
| 4.2.1 Rasio Varians (Selisih) Anggaran Pendapatan | 39 |
| 4.2.2 Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah | 43 |
| 4.2.3 Rasio Varians Belanja | 48 |
| 4.2.4 Rasio Efisiensi Belanja Daerah | 52 |
| 4.3 Pembahasan..... | 56 |
| 4.3.1 Pembahasan Rasio Varians Anggaran Pendapatan | 56 |
| 4.3.2 Pembahasan Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah | 61 |
| 4.3.3 Pembahasan Rasio Varians Belanja | 66 |

| | |
|---|----|
| 4.3.4 Pembahasan Rasio Efisiensi Belanja Daerah | 70 |
|---|----|

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

| | |
|----------------------|----|
| 5.1 Kesimpulan | 76 |
| 5.2 Saran | 77 |

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

| | Halaman |
|--|---------|
| Tabel 1.1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan | 3 |
| Tabel 2.1 Kategori Rasio Varians Pendapatan..... | 22 |
| Tabel 2.2 Kategori Rasio Efektivitas | 23 |
| Tabel 2.3 Kategori Rasio Varians Belanja | 24 |
| Tabel 2.4 Kategori Rasio Efisiensi Belanja | 25 |
| Tabel 2.5 Penelitian Terdahulu | 26 |
| Tabel 3.1 Operasional Variabel..... | 31 |
| Tabel 3.2 Informan Penelitian | 32 |
| Tabel 4.1 Perhitungan Persentase Varians Pendapatan | 39 |
| Tabel 4.2 Perhitungan Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah | 44 |
| Tabel 4.3 Perhitungan Rasio Varians | 48 |
| Tabel 4.4 Perhitungan Rasio Efisiensi Belanja | 52 |

DAFTAR GAMBAR

| | Halaman |
|-------------------------------------|---------|
| Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran..... | 29 |
| Gambar 4.1 Struktur Organisasi..... | 38 |

DAFTAR GRAFIK

| | | |
|------------|--|----|
| Grafik 4.1 | Rasio Varians (Selisih) Anggaran Pendapatan | 40 |
| Grafik 4.2 | Rasio Efektivitas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah..... | 44 |
| Grafik 4.3 | Rasio Varians Belanja..... | 49 |
| Grafik 4.4 | Rasio Efisiensi Belanja | 53 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu aspek fundamental dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Melalui pengelolaan yang efisien dan transparan, pemerintah daerah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengalokasikan sumber daya yang ada secara optimal. Dalam hal ini, Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BKPD) memegang peran kunci, terutama dalam proses penyusunan dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

APBD sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah daerah, memerlukan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Menurut Muindro Renyowijoyo (2013), anggaran di sektor publik memiliki peran yang strategis sebagai instrumen untuk mencapai target dalam periode tertentu. Berbeda dengan sektor swasta yang berorientasi pada keuntungan, anggaran di sektor publik harus bersifat terbuka dan transparan agar dapat dievaluasi dan diperbaiki di masa mendatang. Transparansi dalam pengelolaan anggaran menjadi prasyarat penting bagi keberhasilan reformasi administrasi publik, termasuk dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Penyusunan APBD juga menjadi pedoman utama dalam kebijakan alokasi dan distribusi sumber daya daerah. Badrudin (2017) menjelaskan bahwa APBD dirancang untuk mendukung pelaksanaan kebijakan pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan mencakup semua pendapatan

dan pengeluaran pemerintah daerah selama satu tahun anggaran, APBD menjadi alat pengendali yang merefleksikan prioritas pembangunan daerah.

Sumber pendapatan utama dalam APBD adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang mencerminkan kapasitas finansial daerah dalam melaksanakan pembangunan. Firdausy (2017) menegaskan pentingnya PAD sebagai indikator kemampuan otonomi keuangan daerah. Selain PAD, pendapatan daerah mencakup transfer dana dari pemerintah pusat dan sumber lain yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Belanja daerah, di sisi lain, digunakan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib dan pilihan yang menjadi kewenangan daerah, termasuk pembiayaan program-program pembangunan.

Dalam pengelolaan keuangan daerah, efektivitas dan efisiensi merupakan prinsip utama. Mardiasmo (2012) menyatakan bahwa efektivitas tercapai ketika tujuan kebijakan direalisasikan secara optimal, sedangkan efisiensi diukur melalui perbandingan antara output yang dihasilkan dengan input yang digunakan. Dengan demikian, evaluasi terhadap pengelolaan pendapatan dan belanja daerah tidak hanya penting untuk menilai kinerja pemerintah daerah, tetapi juga untuk memastikan bahwa alokasi sumber daya benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Namun, berbagai tantangan dalam pengelolaan APBD, seperti rendahnya transparansi, perencanaan yang kurang matang, serta alokasi anggaran yang tidak efektif, dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan. Oleh karena itu, analisis pendapatan dan belanja daerah menjadi relevan untuk mengidentifikasi

permasalahan yang ada serta memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi peningkatan kinerja keuangan daerah.

Kabupaten Bone Bolango, sebagai salah satu daerah otonom di Indonesia, menghadapi tantangan unik dalam mengelola keuangannya. Dengan sumber daya yang terbatas dan kebutuhan pembangunan yang luas, efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran menjadi sangat kritis. Analisis pendapatan dan belanja daerah pada Badan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Bone Bolango menjadi penting untuk mengidentifikasi sejauh mana efektivitas pengelolaan keuangan daerah telah dilakukan. Penelitian ini akan menganalisis kinerja keuangan daerah melalui laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah, dengan fokus pada aspek-aspek seperti realisasi pendapatan daerah, efisiensi penggunaan anggaran belanja, dan dampaknya pada pembangunan daerah. Berikut adalah tabel ringkasan laporan realisasi anggaran pendapatan pemerintah Badan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Bone Bolango:

Tabel 1.1
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran
Pemerintah Badan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Bone Bolango

| Tahun | Anggaran Pendapatan (Rp) | Realisasi Pendapatan (Rp) | Anggaran Belanja (Rp) | Realisasi Belanja (Rp) |
|--------------|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 2021 | 1.063.533.981.670 | 1.011.278.890.342,79 | 1.062.878.884.547,48 | 970.627.002.491,02 |
| 2022 | 915.341.845.318,50 | 886.289.616.614,22 | 910.632.173.316,88 | 776.963.401.190,40 |
| 2023 | 930.076.588.224,33 | 941.908.522.583,71 | 859.920.055.504,80 | 816.767.049.389,00 |

Sumber: LRA Pemerintah Badan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Bone Bolango

Secara umum, realisasi keuangan yang mendekati atau melebihi anggaran yang dialokasikan dapat dianggap sebagai hal yang menguntungkan bagi pemerintah daerah, terutama jika realisasi tersebut mencerminkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Ini dapat menunjukkan bahwa pemerintah

daerah mampu mengelola keuangan dengan baik dan dapat memaksimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan pembangunan.

Berdasarkan tabel laporan realisasi anggaran, terdapat beberapa fenomena menarik yang mencerminkan dinamika pengelolaan keuangan daerah kabupaten Bone Bolango, yakni pada realisasi anggaran pendapatan, secara keseluruhan realisasi pendapatan daerah menunjukkan tren yang relatif stabil dengan persentase realisasi yang mendekati atau sedikit di bawah 100% dari anggaran yang dialokasikan. Namun, terdapat anomali pada tahun 2023 di mana realisasi pendapatan justru melebihi anggaran yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 101,27%. Fenomena ini bisa diindikasikan sebagai hasil dari peningkatan efisiensi pengumpulan pendapatan atau adanya sumber pendapatan tambahan yang tidak terduga.

Kemudian untuk realisasi anggaran belanja, realisasi anggaran belanja mengalami fluktuasi yang signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022, persentase realisasi belanja jauh di bawah 100%, yaitu hanya 85,32%, yang menandakan adanya anggaran yang tidak terserap secara optimal. Ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti keterlambatan dalam pelaksanaan program atau proyek, penghematan yang tidak terencana, atau kendala administratif. Sedangkan di tahun 2023 menunjukkan peningkatan signifikan dalam realisasi belanja dengan mencapai 94,98% dari anggaran yang dialokasikan. Ini bisa mengindikasikan adanya perbaikan dalam perencanaan dan eksekusi anggaran, serta pemanfaatan yang lebih efektif dari sumber daya yang ada.

Perbedaan yang mencolok antara realisasi pendapatan dan belanja pada beberapa tahun tersebut mengindikasikan tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Bone Bolango dalam menyeimbangkan pendapatan dan pengeluaran. Sementara realisasi pendapatan menunjukkan kinerja yang cukup baik, tantangan nyata terletak pada optimalisasi anggaran belanja. Fluktuasi ini menyoroti kebutuhan akan perbaikan dalam proses perencanaan anggaran, pengendalian, dan pelaksanaan program agar setiap anggaran yang dialokasikan dapat dimanfaatkan secara maksimal demi mendukung pembangunan daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis merumuskan judul penelitian ini adalah: Analisis Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Pada Badan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Bone Bolango.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas maka permasalahan yang di teliti adalah bagaimana keseimbangan anggaran dan realisasi belanja pada Badan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Bone Bolango?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Yang menjadi maksud dari penelitian ini adalah untuk menganalisis keseimbangan anggaran dan realisasi belanja pada Badan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Bone Bolango.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dibuat maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis keseimbangan anggaran dan realisasi belanja pada Badan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Bone Bolango.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dengan menyediakan sumber bacaan dan referensi yang dapat meningkatkan pemahaman tentang realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumber informasi teoritis dan empiris bagi para peneliti yang tertarik dalam bidang ini.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini akan meningkatkan wawasan dan kapasitas penulis, khususnya dalam bidang akuntansi sektor publik terutama terkait kinerja keuangan pemerintah daerah. Selain itu, penulis juga dapat menggunakan penelitian ini untuk membandingkan teori yang dipelajari selama studi dengan realitas praktik dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

b. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini dapat menjadi referensi dan sumber masukan tambahan bagi pemerintah daerah dalam menganalisis kinerja keuangan mereka. Temuan dari penelitian ini dapat menjadi alternatif untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan pemerintah daerah, yang pada akhirnya dapat membantu mencapai kesuksesan dalam pelaksanaan otonomi daerah.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Kajian Teoritis

2.1.1 Anggaran Sektor Publik

Charles (2019) berpendapat bahwa pembentukan anggaran publik adalah teori yang mencakup proses pembentukan anggaran publik, yang melibatkan identifikasi kebutuhan dan prioritas pengeluaran, pengumpulan pendapatan, serta alokasi sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan pemerintah. Di tingkat daerah, ini mencakup penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang mencerminkan kebutuhan dan aspirasi lokal. Fokus dari teori ini adalah pada implementasi anggaran publik, yaitu bagaimana alokasi sumber daya yang telah ditetapkan dalam anggaran direalisasikan melalui program-program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Ini mencakup manajemen pengeluaran, pemantauan pelaksanaan anggaran, dan upaya untuk memastikan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana publik. Evaluasi kinerja anggaran publik, yaitu penilaian terhadap sejauh mana anggaran telah mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan, serta efisiensi, efektivitas, dan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik. Di tingkat daerah, evaluasi anggaran juga melibatkan analisis terhadap laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja untuk mengevaluasi kinerja keuangan daerah.

Anggaran sektor publik adalah rencana keuangan yang disusun oleh pemerintah atau organisasi publik untuk mengalokasikan sumber daya ke berbagai program, proyek, dan layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Anggaran ini

mencakup estimasi pendapatan (misalnya, dari pajak, retribusi, dan sumber pendapatan lainnya) dan belanja yang akan dilakukan selama periode tertentu, biasanya satu tahun anggaran. Tujuan utama anggaran sektor publik adalah untuk memastikan bahwa sumber daya publik digunakan secara efisien dan efektif dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat serta menjalankan fungsi pemerintahan.

2.1.2 Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

APBD, atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, adalah landasan untuk mengelola keuangan daerah selama satu tahun anggaran, dimulai dari 1 Januari hingga 31 Desember. Ini adalah konsep keuangan yang digunakan oleh pemerintah daerah selama satu tahun yang telah disahkan. APBD digunakan sebagai alat oleh pemerintah daerah setelah berkoordinasi dengan badan legislatif, DPRD. APBD adalah alat yang memastikan ketaatan dalam pengumpulan pendapatan dan pengeluaran daerah sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam pengaturan anggaran, baik pendapatan maupun pengeluaran, harus mengikuti ketentuan atau prinsip yang menjadi dasarnya. Oleh karena itu, dalam menyusun APBD, pemerintah daerah harus mempertimbangkan metode administratif yang telah disahkan (Bastian, 2015).

APBD terdiri dari tiga komponen utama: pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan pendapatan daerah lainnya yang sah. PAD mencakup Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang merupakan sumber pendapatan utama dari pemerintah daerah yang diperoleh dari wajib pajaknya.

Dana Perimbangan merupakan dana yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat sebagai bagian dari pelaksanaan desentralisasi fiskal. Selain dari sumber pendapatan daerah dan pemerintah pusat, pemerintah daerah juga mendapatkan pendapatan dari daerah lain, seperti Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi atau pemda lainnya, yang termasuk dalam pendapatan daerah lainnya yang sah.

2.1.3 Anggaran Partisipatif

Menurut Astuti (2016) Anggaran Partisipatif merupakan kerangka kerja konseptual yang menyoroti peran serta masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran publik. Dalam konteks pemerintah daerah, partisipasi masyarakat dianggap penting karena dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan legitimasi kebijakan anggaran. Ketika masyarakat terlibat secara aktif dalam penyusunan anggaran, kebutuhan dan prioritas lokal dapat lebih baik tercermin dalam alokasi dana publik. Partisipasi masyarakat dalam proses anggaran juga dapat meningkatkan pemahaman dan dukungan terhadap kebijakan anggaran yang diambil oleh pemerintah daerah. Hal ini dapat mengurangi ketidakpuasan masyarakat terhadap penggunaan dana publik dan meningkatkan kepercayaan terhadap lembaga pemerintah.

Dengan demikian, Teori Anggaran Partisipatif dapat menjadi landasan penting dalam memahami bagaimana partisipasi masyarakat dapat memengaruhi kinerja keuangan daerah, terutama dalam konteks penyusunan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

2.1.4 Manajemen Keuangan Daerah

Manajemen Keuangan Daerah membahas prinsip-prinsip dasar yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan pemerintah daerah, termasuk pendapatan, belanja, dan utang daerah. Ini melibatkan strategi pengelolaan keuangan yang efisien dan efektif untuk memastikan keberlanjutan dan keseimbangan keuangan dalam jangka panjang.

Menurut Riyanto (2017) prinsip-prinsip yang tercakup dalam manajemen keuangan daerah meliputi:

1. Pengelolaan Pendapatan yang memastikan sumber pendapatan daerah yang beragam dikelola dengan baik, termasuk pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, dan sumber pendapatan lainnya. Ini melibatkan strategi untuk meningkatkan penerimaan pajak, retribusi, dan sumber pendapatan lainnya, serta diversifikasi sumber pendapatan untuk mengurangi ketergantungan pada satu sumber pendapatan tertentu.
2. Pengelolaan Belanja yang memastikan belanja daerah dialokasikan secara efisien sesuai dengan prioritas dan kebutuhan masyarakat. Ini melibatkan proses perencanaan anggaran yang matang, evaluasi terhadap efektivitas program dan kegiatan, serta pengendalian biaya untuk menghindari pemborosan dan penyalahgunaan dana publik.
3. Pengelolaan Utang Daerah yang memastikan utang daerah dikelola secara bijaksana untuk menghindari risiko keuangan yang berlebihan. Ini melibatkan pengawasan terhadap pembiayaan utang, pengendalian risiko, dan pengembangan strategi pengelolaan utang yang berkelanjutan.

2.1.5 Akuntansi Sektor Publik

Menurut Mardiasmo (2018), Akuntansi Sektor Publik merupakan kerangka kerja konseptual yang membahas praktik akuntansi yang relevan dalam konteks sektor publik, termasuk pemerintah daerah. Ini mencakup standar akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, serta prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan daerah. Penerapan standar akuntansi yang tepat penting untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan keandalan informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Ini meliputi penggunaan standar seperti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), yang mengatur prosedur dan prinsip akuntansi yang harus dipatuhi oleh entitas pemerintah dalam penyusunan laporan keuangan.

Menurut Muindro Renyowijoyo (2012:1). “Akuntansi sektor publik adalah sistem akuntansi yang dipakai oleh lembaga-lembaga publik sebagai salah satu alat pertanggungjawaban kepada publik”. Sekarang terdapat perhatian yang makin besar terhadap praktek akuntansi yang dilakukan lembaga-lembaga publik, baik akuntansi sektor pemerintahan maupun lembaga publik non pemerintahan. Lembaga publik mendapat tuntutan dari masyarakat untuk dikelola secara transparan dan bertanggung jawab.

2.1.6 Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, pendapatan daerah adalah hak yang dimiliki pemerintah daerah dan diakui sebagai elemen yang meningkatkan kekayaan bersih selama satu periode tahun tertentu. Sementara itu, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, pendapatan daerah mencakup seluruh penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah serta

penerimaan lain yang diakui sebagai peningkatan ekuitas sesuai peraturan perundang-undangan dan menjadi hak daerah dalam satu tahun anggaran. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sumber pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan pendapatan daerah lainnya yang sah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah hak daerah yang diakui sebagai elemen penambah kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu. Menurut Siahaan (2005), PAD mencakup pendapatan yang dipungut dan diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 menjelaskan bahwa PAD merupakan sumber pendapatan yang bersumber dari wilayah daerah itu sendiri, meliputi hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan asli daerah lainnya yang sah sesuai peraturan perundang-undangan. Tujuan PAD adalah memberikan kemandirian finansial kepada daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Berikut adalah uraian masing-masing sumber pendapatan daerah:

1) Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, pajak daerah adalah kontribusi wajib yang bersifat memaksa kepada pemerintah daerah, yang diatur berdasarkan undang-undang. Pajak ini tidak memberikan manfaat langsung kepada pembayar, tetapi hasilnya digunakan untuk kepentingan daerah. Menurut Mardiasmo (2011), pajak daerah merupakan kewajiban yang

harus dipenuhi oleh individu atau badan tanpa adanya imbalan langsung, dan digunakan untuk mendukung pembangunan daerah demi kesejahteraan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 mengelompokkan pajak daerah menjadi dua jenis:

- a. Pajak Provinsi meliputi Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Alat Berat, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, serta Opsen Pajak MBLB.
- b. Pajak Kabupaten/Kota, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pajak Barang dan Jasa Tertentu, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Sarang Burung Walet, Opsen PKB, serta Opsen BBKBNB.

2) Retribusi Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020, retribusi daerah adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai imbalan atas layanan atau pemberian izin tertentu yang disediakan secara khusus untuk kepentingan individu atau badan. Objek retribusi terdiri dari jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu.

- a. Retribusi Jasa Umum, diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum, yang dapat dimanfaatkan oleh individu atau badan.

- b. Retribusi Jasa Usaha, dilaksanakan berdasarkan prinsip komersial untuk layanan yang disediakan oleh pemerintah daerah.
- c. Retribusi Perizinan Tertentu, merupakan pelayanan izin yang bertujuan mengatur dan mengawasi pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu. Tujuan utamanya adalah melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan pendapatan yang diperoleh daerah dari hasil penyertaan modal pemerintah daerah. Tujuan dari pendapatan ini adalah untuk mengoptimalkan keuntungan yang dihasilkan dari penyertaan modal tersebut. Objek pendapatan ini meliputi bagian laba dari penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta bagian laba dari penyertaan modal pada perusahaan swasta.

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (LLPAD yang Sah) merujuk pada sumber pendapatan asli daerah di luar pajak daerah, retribusi daerah, dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Objek dari LLPAD yang Sah mencakup berbagai jenis penerimaan, antara lain hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan secara tunai atau melalui cicilan, pendapatan dari jasa giro, bunga, komisi, potongan, atau bentuk lainnya sebagai hasil dari transaksi penjualan dan/atau pengadaan barang atau jasa oleh pemerintah daerah. Selain itu, pendapatan ini juga meliputi keuntungan

dari selisih kurs mata uang asing, denda atas keterlambatan pekerjaan, denda pajak, denda retribusi, hasil eksekusi jaminan, penerimaan pengembalian fasilitas sosial dan fasilitas umum, pendapatan dari kegiatan pendidikan dan pelatihan, pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), pengelolaan dana bergulir, pengelolaan BUKP selain dividen, serta pengelolaan Barang Milik Daerah.

2.1.7 Belanja Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan yang disusun oleh Pemerintah Daerah dan dibahas serta disetujui bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), kemudian ditetapkan melalui Peraturan Daerah. APBD memuat rincian pendapatan dan belanja daerah.

Pendapatan daerah mencakup Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Selain itu, pendapatan daerah juga meliputi Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, hibah, dana darurat, dana penyesuaian, dana otonomi khusus, serta bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya.

Belanja Daerah, sesuai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam satu tahun anggaran. Struktur belanja daerah terbagi menjadi:

- a. Belanja Langsung, meliputi belanja pegawai langsung, belanja barang dan jasa, serta belanja modal.

- b. Belanja Tidak Langsung, meliputi belanja pegawai tidak langsung, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa, serta belanja tidak terduga.

2.1.7.1 Belanja Modal

Halim (2008) menyatakan bahwa belanja modal adalah pengeluaran anggaran yang digunakan untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Definisi ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Undang-Undang Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, belanja modal merupakan pengeluaran anggaran pemerintah yang bertujuan untuk menambah inventaris atau aset tetap yang memberikan manfaat lebih dari dua belas bulan (satu periode akuntansi) dan digunakan untuk kepentingan umum. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 71 Tahun 2010 menjelaskan bahwa belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan untuk pembelian, pengadaan, atau pembangunan aset tetap berwujud yang memiliki nilai manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Lebih lanjut, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 pasal 53 ayat 2, disebutkan bahwa nilai aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal harus mencakup harga beli atau biaya pembangunan aset, ditambah dengan semua biaya yang terkait dengan pengadaan atau pembangunan hingga aset tersebut siap digunakan. Pasal 53 ayat 4 juga

menyatakan bahwa kepala daerah menetapkan batas minimal kapitalisasi sebagai dasar pembebanan belanja modal. Pengeluaran anggaran untuk belanja barang tersebut harus memenuhi batas minimal dan memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta bersifat tidak rutin.

2.1.7.2 Jenis-jenis Belanja Modal

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, yang merupakan perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Dalam peraturan ini, Belanja Modal diklasifikasikan ke dalam lima kategori utama sebagai berikut:

1. Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah merujuk pada pengeluaran anggaran atau biaya yang digunakan untuk berbagai kegiatan terkait tanah, seperti pengadaan, pembebasan, penyelesaian balik nama, penyewaan tanah, pengosongan, pengurungan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, serta pengeluaran lain yang berkaitan dengan perolehan hak atas tanah, hingga tanah tersebut siap digunakan.

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah pengeluaran anggaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan mesin, serta inventaris atau aset kantor yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi (dua belas bulan), hingga peralatan mesin tersebut siap digunakan.

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan merujuk pada pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan atau penggantian gedung dan bangunan, termasuk biaya perencanaan, pengawasan, dan pengelolaan pembangunan yang bertujuan untuk menambah kapasitas gedung dan bangunan, hingga kondisi gedung dan bangunan tersebut siap digunakan.

4. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, penggantian, penambahan, peningkatan, serta pembangunan atau pembuatan jalan, irigasi, dan jaringan, termasuk perawatan, perencanaan, pengawasan, dan pengelolaan yang bertujuan untuk menambah kapasitas hingga jalan, irigasi, dan jaringan tersebut siap digunakan.

5. Belanja Modal Fisik Lainnya

Belanja Modal Fisik Lainnya merujuk pada pengeluaran atau biaya untuk pengadaan, penggantian, penambahan, peningkatan pembangunan, serta perawatan fisik lainnya yang tidak termasuk dalam kategori Belanja Modal Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Irigasi, dan Jaringan. Belanja ini juga mencakup kontrak sewa beli, pembelian barang kesenian, barang purbakala, barang untuk museum, hewan ternak, tanaman, buku-buku, dan jurnal ilmiah.

2.1.8 Laporan Realisasi Anggaran

Mardiasmo (2018) menjelaskan bahwa laporan realisasi anggaran merupakan bagian penting dari laporan keuangan pemerintah yang menggambarkan detail tentang pencapaian dan alokasi anggaran suatu entitas pelaporan untuk periode tertentu. Fungsinya adalah untuk memberikan gambaran tentang pencapaian dan alokasi anggaran entitas pelaporan secara rinci. Dalam laporan ini, perbandingan antara anggaran yang telah ditetapkan dengan realisasinya menunjukkan sejauh mana target yang telah disepakati oleh badan legislatif dan eksekutif telah tercapai sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Mardiasmo (2018) Ruang Lingkup Laporan Realisasi Anggaran

1. Ketentuan ini berlaku untuk penyusunan Laporan Realisasi Anggaran yang disajikan menggunakan prinsip akuntansi kas.
2. Aturan ini mengikat semua entitas pelaporan, termasuk pemerintah pusat dan daerah, yang menerima alokasi anggaran berdasarkan APBN/APBD, dengan pengecualian perusahaan negara/daerah.
3. Meskipun entitas pelaporan menerapkan akuntansi berbasis akrual dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan, tetap diwajibkan untuk menyusun Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan prinsip akuntansi kas.

Laporan Realisasi Anggaran memberikan informasi tentang pencapaian pendapatan, belanja, surplus/defisit, dan pembiayaan suatu entitas pelaporan, yang kemudian dibandingkan dengan anggarannya. Tujuan laporan ini adalah untuk membantu pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan terkait alokasi

sumber daya ekonomi, serta untuk memastikan akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan cara:

1. Memberikan gambaran tentang asal, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi.
2. Menyediakan informasi menyeluruh tentang pencapaian anggaran, yang membantu dalam menilai efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran oleh pemerintah.
3. Laporan realisasi anggaran juga memberikan informasi yang diperlukan untuk memproyeksikan sumber daya ekonomi yang akan tersedia untuk mendukung kegiatan pemerintah pusat dan daerah di masa mendatang melalui penyajian data secara perbandingan.

2.1.9 Analisis Pendapatan dan Belanja Daerah

Dengan menggunakan informasi dari laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah, kinerja pendapatan dan belanja dapat dievaluasi melalui analisis berikut:

a. Rasio Varians (Selisih) Anggaran Pendapatan

Menurut Mahmudi (2016), Rasio Varians Pendapatan adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat ketepatan antara target pendapatan yang telah direncanakan dengan realisasi pendapatan yang dicapai oleh pemerintah daerah. Rasio ini menggambarkan seberapa besar perbedaan antara anggaran pendapatan yang diestimasi dalam APBD dengan pendapatan yang benar-benar terealisasi. Rumus yang digunakan adalah :

$$\text{Persentase} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan} - \text{Anggaran Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

Varians Pendapatan

Anggaran Pendapatan

Rasio varians pendapatan penting karena mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam merencanakan dan mengelola sumber-sumber pendapatannya. Jika rasio ini rendah, artinya realisasi pendapatan mendekati target yang direncanakan, menunjukkan perencanaan yang baik dan estimasi yang akurat. Sebaliknya, rasio yang tinggi dapat menunjukkan bahwa ada ketidaksesuaian antara target dan realisasi, yang bisa disebabkan oleh perencanaan yang kurang matang atau faktor eksternal yang tidak terduga. Berikut tabel kategori penilaian untuk rasio varians pendapatan:

Tabel 2.1 Kategori Rasio Varians Pendapatan

| Rasio Varians Pendapatan | Kategori |
|--------------------------|---------------|
| 0% - 5% | Sangat Rendah |
| >5% - 10% | Rendah |
| >10% - 15% | Sedang |
| >15% - 20% | Tinggi |
| >20% | Sangat Tinggi |

Sumber: Mahmudi (2016)

b. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Rasio Efektif Keuangan Daerah Otonomi adalah indikator yang mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam mewujudkan pendapatan asli daerah (PAD) sesuai dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi sebenarnya di daerah tersebut. Kemampuan daerah untuk melaksanakan tugasnya dianggap efektif jika rasio yang dicapai setidaknya mencapai 100%. Namun, semakin tinggi nilai rasio efektif, semakin baik kemampuan daerah

dalam menjalankan tugasnya (Halim, 2011). Sedangkan menurut Mahmudi (2016) Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil tidanya tujuan, maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Berikut adalah formulasinya:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Rasio efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan. Secara umum, nilai efektivitas PAD dapat dikategorikan sebagai berikut :

Tabel 2.2 Kategori Rasio Efektivitas

| Realisasi Penerimaan PAD terhadap target Penerimaan PAD | Efektivitas PAD |
|--|------------------------|
| >100% | Sangat Efektif |
| 100% | Efektif |
| 90% - 99% | Cukup Efektif |
| 75% - 89% | Kurang Efektif |
| <75% | Tidak Efektif |

Sumber: Mahmudi (2016:141)

c. Rasio Varians Belanja

Rasio Varians Belanja adalah indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana realisasi belanja daerah sesuai dengan anggaran yang telah direncanakan. Rasio ini diperoleh dengan membandingkan perbedaan antara anggaran belanja yang telah ditetapkan dengan realisasi belanja yang terjadi, kemudian dinyatakan dalam bentuk persentase (Halim, 2016).

Rasio ini menunjukkan tingkat akurasi dan efisiensi pemerintah daerah dalam mengelola anggaran belanjanya. Jika rasio varians belanja rendah, berarti realisasi belanja sesuai dengan anggaran yang direncanakan, menunjukkan pengelolaan anggaran yang baik. Sebaliknya, rasio varians belanja yang tinggi mengindikasikan adanya deviasi signifikan antara anggaran dan realisasi, yang bisa menunjukkan perencanaan yang kurang matang atau ketidakefisienan dalam pelaksanaan anggaran. Berikut rumus yang digunakan:

$$\text{Persentase Varians Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja} - \text{Anggaran Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Tabel 2.3 Kategori Rasio Varians Belanja

| Presentasi Rasio Varians Belanja | Kategori |
|---|-----------------|
| 0% - 5% | Sangat Efisien |
| >5% - 10% | Efisien |
| >10% - 15% | Cukup Efisien |
| >15% - 20% | Kurang Efisien |
| >20% | Tidak Efisien |

Sumber: Mahmudi (2016)

d. Rasio Efisiensi Belanja Daerah

Menurut Mahmudi (2016), efisiensi belanja daerah adalah ukuran yang digunakan untuk menilai seberapa optimal pemerintah daerah dalam menggunakan anggarannya untuk mencapai hasil atau output yang diinginkan. Efisiensi ini dilihat dari seberapa besar sumber daya (anggaran) yang digunakan untuk menghasilkan layanan publik dan mencapai tujuan pembangunan.

Rasio efisiensi belanja adalah alat untuk mengevaluasi sejauh mana pemerintah berhasil menghemat anggaran. Angka yang dihasilkan dari rasio ini bersifat relatif, bukan absolut. Kita dapat menyimpulkan bahwa belanja pemerintah daerah pada tahun tertentu dianggap efisien jika rasio efisiensi kurang dari 100%. Sebaliknya, jika melebihi 100%, itu menunjukkan adanya pemborosan anggaran. Berikut adalah formulasinya:

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Indikator ini penting karena menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola anggaran dengan baik, yaitu dengan meminimalkan pemborosan dan memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan nilai atau manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Efisiensi belanja yang tinggi berarti pemerintah daerah mampu mencapai hasil yang optimal dengan biaya yang relatif rendah, sedangkan efisiensi yang rendah bisa mengindikasikan adanya inefisiensi, pemborosan, atau alokasi sumber daya yang kurang tepat. Berikut adalah tabel kategori penilaian rasio ini:

Tabel 2.4 Kategori Rasio Efisiensi Belanja

| Rasio Efisiensi Belanja | Kategori |
|--------------------------------|-----------------|
| >90% | Sangat Efisien |
| 80% - 90% | Efisien |
| 70% - 79,99% | Cukup Efisien |
| 60% - 69,99% | Kurang Efisien |
| < 60% | Tidak Efisien |

Sumber: Mahmudi (2016)

2.1.10 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah istilah yang merujuk kepada studi atau investigasi yang telah dilakukan sebelumnya dalam suatu bidang pengetahuan atau topik tertentu. Ini mencakup kajian-kajian yang dilakukan oleh para peneliti sebelumnya yang relevan dengan subjek yang sedang diteliti. Penelitian terdahulu menjadi dasar penting dalam memahami konteks, teori, metodologi, temuan, dan kesimpulan yang telah ada sebelumnya, yang kemudian dapat digunakan sebagai landasan untuk mengembangkan penelitian baru atau mengeksplorasi aspek yang lebih mendalam dari topik tersebut. Berikut penelitian terdahulu yang digunakan:

Tabel 2.5
Penelitian Terdahulu

| No. | Nama | Judul | Tujuan | Hasil |
|-----|--------------|---|---|---|
| 1. | Rusdi (2018) | Analisis Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang | Penelitian ini bertujuan untuk menilai seberapa efektif realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah di pemerintah daerah Kabupaten Enrekang. Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi, survei, dan observasi. | Hasil penelitian yang dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang mengenai Analisis Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) menunjukkan bahwa kinerja pendapatan belum mencapai target, namun masih dinilai efektif karena jumlah yang terealisasi lebih kecil dari yang dianggarkan. Di sisi lain, kinerja belanja pemerintah daerah Kabupaten Enrekang dinilai efisien dalam penghematan anggaran belanja, sebagaimana tidak ada angka realisasi yang melebihi anggaran belanja yang ditargetkan. |
| 2. | Rifky Nur | Analisis | Penelitian ini | Hasil dari penelitian yang |

| | | | | |
|----|-------------------------|--|--|--|
| | Fasha (2023) | Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Kota Samarinda 2017-2020 | bertujuan untuk mengevaluasi tingkat efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah di pemerintah Kota Samarinda. Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif, dengan pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi. | dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda mengenai analisis laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) menunjukkan bahwa kinerja pendapatan telah mencapai target dan dikategorikan sebagai sangat efektif, yang terlihat dari jumlah yang terealisasi lebih besar dari yang dianggarkan. Sementara itu, kinerja belanja pemerintah daerah Kota Samarinda dinilai sangat efisien karena berhasil menghemat anggaran. Hal ini disebabkan oleh tingkat dan kriteria yang telah ditetapkan serta pencapaian target yang sesuai. |
| 3. | Fitria Syaifanur (2022) | Analisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk Menilai Tingkat Ekonomi, Efektivitas, Dan Efisiensi Kinerja Keuangan Blud | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat ekonomi, efisiensi dan efektivitas kinerja keuangan BLUD RSUD dr Zainoel Abidin Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Zainoel Abidin masih kurang ekonomis dan tidak efisien, namun sudah efektif berdasarkan Pengukuran Kinerja Peraturan Menteri Keuangan nomor 214 tahun 2017. |
| 4. | Amalia, N. (2020) | Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2015– | Untuk mengetahui seberapa efektif dan efisien kinerja keuangan daerah dalam hal realisasi pendapatan dan belanja berdasarkan data | Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pendapatan daerah tergolong sangat baik karena realisasi penerimaan PAD setiap tahunnya mendekati atau bahkan melebihi target yang ditetapkan. Sementara itu, efisiensi belanja daerah juga cukup baik, meskipun terdapat beberapa kendala dalam |

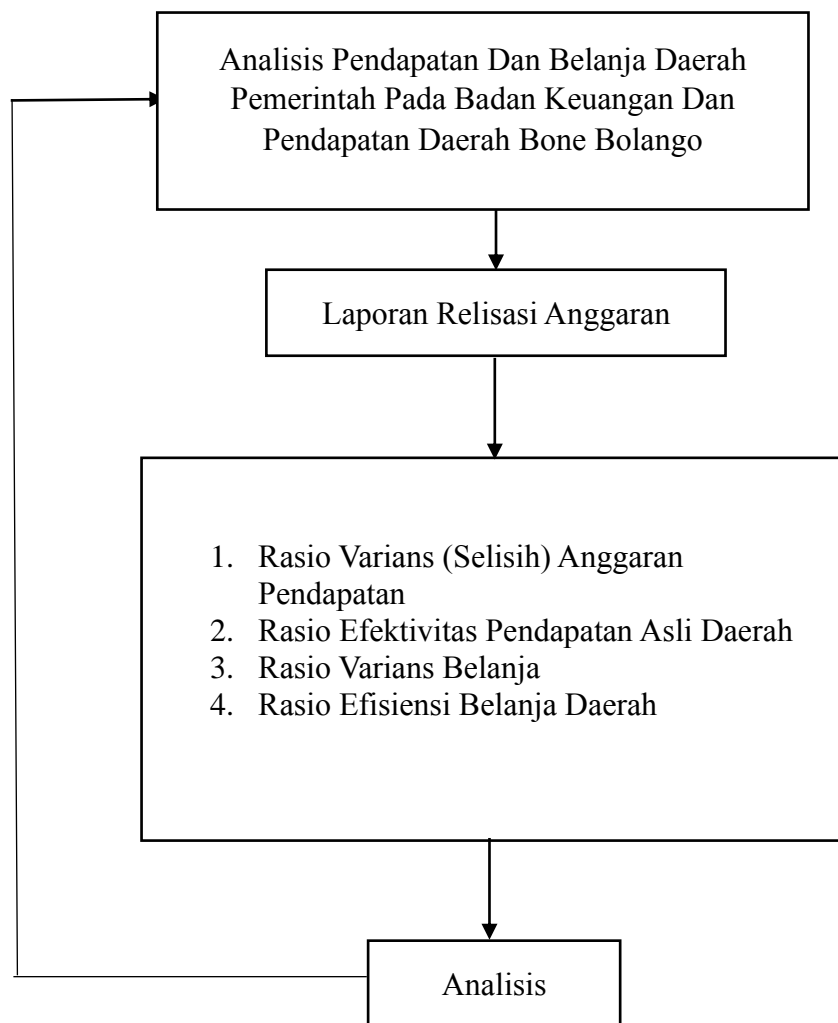
| | | | | |
|----|-------------------------------------|--|---|---|
| | | 2019 | LRA lima tahun. | penyerapan anggaran di awal tahun anggaran. Penelitian ini menekankan pentingnya evaluasi berkala dan perencanaan yang lebih akurat agar pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih optimal. |
| 5. | Putri, D. N., & Prasetyo, A. (2021) | Evaluasi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Berdasarkan Rasio Realisasi APBD di Kabupaten Banyumas | Mengevaluasi kinerja keuangan daerah dengan menganalisis perbandingan antara anggaran dan realisasi pendapatan serta belanja. | Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan anggaran di Kabupaten Banyumas cukup akurat, ditandai dengan varians pendapatan yang rendah, serta tingkat efektivitas PAD yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Namun, realisasi belanja masih menunjukkan selisih yang cukup besar terhadap anggaran, mengindikasikan adanya permasalahan dalam penyerapan anggaran dan pelaksanaan program. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas dan efisiensi keuangan daerah sangat dipengaruhi oleh kualitas perencanaan dan kedisiplinan dalam pelaksanaan anggaran. |

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran ini dimulai dengan analisis laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah pada Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Bone Bolango, yang selanjutnya dianalisis melalui laporan realisasi anggaran. Laporan ini dievaluasi menggunakan beberapa rasio keuangan penting, seperti rasio varians anggaran pendapatan, rasio pertumbuhan pendapatan, rasio derajat desentralisasi, dan rasio efektivitas pendapatan asli daerah. Selain itu, juga mencakup analisis rasio varians belanja, rasio pertumbuhan belanja, rasio belanja operasi, dan rasio belanja modal. Hasil dari analisis berbagai rasio ini akan

digunakan untuk menyusun kesimpulan dalam bagian analisis yang bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran daerah.

Berikut adalah gambaran kerangka pemikiran tersebut:



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

BAB III

OBJEK DAN METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian seperti yang telah di uraikan dalam bab sebelumnya, maka yang menjadi obyek penelitian adalah Analisis Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Pada Badan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Bone Bolango.

3.2 Metodologi Penelitian Yang Digunakan

Menurut Sugiyono (2015) metode penelitian ini merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian ini di dasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris dan sistematis. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif yaitu bagaimana nilai rasio pendapatan dan belanja daerah pemerintah pada Badan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Bone Bolango dari tahun 2021 sampai dengan 2023.

3.2.1 Operasionalisasi Variabel

Untuk menemukan data apa yang di perlukan, maka terlebih dahulu perlu menjelaskan definisi operasional indikator yang di gunakan dalam penelitian ini. Seperti yang diuraikan sebelumnya bahwa dalam menganalisis rasio pendapatan Pemerintah, kita perlu menganalisis kinerja dengan menggunakan alat ukur berupa rasio. Maka dari itu, penelitian ini dapat dioperasionalisasikan sebagai berikut :

Operasi Variabel

| Variabel | Dimensi Pengukuran | Skala |
|----------------------------|--------------------------------|-------|
| Laporan Realisasi Anggaran | Rasio Varians Pendapatan | Rasio |
| | Rasio Efektivitas PAD | Rasio |
| | Rasio Varians Belanja | Rasio |
| | Rasio Efisiensi Belanja Daerah | Rasio |

Sumber: Mahmudi (2016)

3.2.2 Jenis dan Sumber Data

3.2.2.1 Jenis Data

Adapun dalam penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif adalah jenis data yang tidak berbentuk angka-angka, yang umumnya diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terkait pada menjadi lokasi penelitian. Sedangkan data kuantitatif adalah data yang berupa angka-angka, baik itu laporan keuangan dan dokumen-dokumen pendukung lainnya seperti laporan realisasi anggaran.

3.2.2.2 Sumber Data

1) Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh dari lokasi penelitian yaitu Badan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Bone Bolango berupa data hasil wawancara penelitian dengan pihak-pihak terkait dalam penelitian ini, seperti pimpinan serta karyawan. Data sekunder diperlukan dengan tujuan melengkapi data primer.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang bersumber dari pengkajian kepustakaan yang berisi dasar-dasar teori, standar-standar dan bahan-bahan pendukung seperti dokumen yang berisikan data keuangan, baik laporan keuangan dan laporan pendukung lainnya seperti laporan realisasi anggaran.

3.2.3 Informan Penelitian

Sugiyono (2020) menjelaskan bahwa informan dalam penelitian kualitatif merupakan sumber informasi yang dapat menyampaikan data sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada di lapangan. Sementara itu, Moleong (2006) menyatakan bahwa informan adalah individu yang digunakan untuk memberikan informasi mengenai situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Yang menjadi informan untuk mendukung hasil dari penelitian ini dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.2
Informan Penelitian

| No. | Informan | Jumlah |
|-----|---|--------|
| 1. | Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah | 1 |
| 2. | Staf Perencanaan dan Penganggaran | 1 |
| 3. | Auditor Internal atau Bagian Pengawasan | 1 |

Penelitian ini akan lebih terfokus dengan mengkonformasi hasil dari perhitungan rasio. Berikut tupoksi dari ketiga informan yang akan diwawancarai:

1. Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BKPD), sebagai pejabat utama yang memiliki kewenangan dan wawasan menyeluruh mengenai kebijakan, perencanaan, dan pelaksanaan anggaran daerah, Kepala BKPD adalah informan yang sangat penting. Beliau dapat memberikan penjelasan strategis mengenai pendapatan dan belanja daerah, serta alasan di balik keputusan anggaran.
2. Staf Perencanaan dan Penganggaran, staf yang terlibat dalam penyusunan dan perencanaan anggaran daerah memiliki pengetahuan detail mengenai proses perencanaan, alokasi anggaran, serta hambatan-hambatan dalam pencapaian target pendapatan dan belanja. Informasi mereka akan sangat berguna untuk memahami proses di balik angka-angka anggaran yang ada.
3. Auditor Internal atau Bagian Pengawasan, auditor internal atau staf yang bertugas mengawasi dan memeriksa pelaksanaan anggaran akan dapat memberikan perspektif yang objektif tentang akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Mereka juga dapat memberikan informasi terkait dengan kepatuhan terhadap regulasi serta kesesuaian antara anggaran yang direncanakan dan pelaksanaan di lapangan.

3.2.4 Teknik Pengumpulan Data

Penggunaan teknik pengumpulan data dalam penelitian bertujuan untuk mendapatkan data sesuai dengan prosedur penelitian yang telah ditetapkan. Sugiyono (2015:224) menjelaskan bahwa teknik pengumpulan data merupakan langkah krusial dalam penelitian karena tujuan utamanya adalah menghimpun

data. Dalam konteks penelitian ini, teknik pengumpulan data mencakup metode dokumentasi, observasi, dan wawancara.

1) Dokumentasi

Dokumentasi merujuk pada metode analisis dan pengolahan data yang bersumber dari dokumen-dokumen yang telah ada sebelumnya, yang mendukung keperluan data dalam penelitian.

2) Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati perilaku manusia, proses kerja, serta gejala-gejala alam dan respons dari responden. Dalam konteks penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan langsung untuk mengidentifikasi fakta-fakta di lapangan.

3) Wawancara

Wawancara dalam konteks penelitian terjadi saat peneliti berinteraksi dan berdialog dengan narasumber untuk menggali informasi melalui rangkaian pertanyaan menggunakan teknik tertentu. Moleong (2007:186) menjelaskan bahwa wawancara adalah suatu percakapan dengan tujuan tertentu, melibatkan interaksi antara pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan narasumber yang memberikan jawaban.

3.2.5 Metode Analisis Data

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan analisis yang digunakan untuk pengujian kinerja keuangan yaitu rasio keuangan

yang berhubungan dengan kinerja rasio pendapatan pemerintah. Adapun data yang dianalisis adalah Laporan Realisasi Anggaran untuk periode 3 (tiga) tahun terakhir, yakni tahun 2021, 2022 dan 2023. Langkah-langkah dalam menganalisis rasio pendapatan pemerintah daerah tersebut dapat di lakukan sebagai berikut :

- 1) Mengumpulkan data-data keuangan sehubungan dengan data yang dibutuhkan dalam rasio yang digunakan. Data keuangan tersebut berupa laporan keuangan dan laporan pendukung lainnya seperti Laporan Realisasi Anggaran.
- 2) Mengelompokan data-data keuangan sesuai yang tercantum dalam rumus rasio yang digunakan, dalam bentuk tabel.
- 3) Perhitungan nilai rasio kinerja keuangan pemerintah untuk tiga tahun terakhir.

BAB IV

GAMBARAN LOKASI PENELITIAN, HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Lokasi Penelitian

4.1.1 Sejarah Lokasi Penelitian

Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BKPD) Kabupaten Bone Bolango adalah lembaga pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan serta optimalisasi pendapatan daerah. BKPD memiliki peran penting dalam menyusun, melaksanakan, serta mengawasi kebijakan fiskal daerah agar sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Selain itu, badan ini bertugas mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), memastikan realisasi pendapatan daerah dari berbagai sumber, termasuk pajak daerah dan retribusi, serta mengawasi belanja pemerintah daerah agar selaras dengan kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Dalam menjalankan tugas, BKPD Kabupaten Bone Bolango mengacu pada regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah, termasuk peraturan daerah dan peraturan bupati yang mengatur tata kelola keuangan daerah. BKPD juga berperan dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan pendapatan daerah dengan menerapkan sistem administrasi yang modern dan berbasis digital. Selain itu, badan ini terus berupaya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia agar mampu menghadapi tantangan pengelolaan keuangan daerah yang semakin kompleks. Dengan perannya tersebut, BKPD berkontribusi dalam menciptakan tata kelola keuangan daerah yang sehat dan berkelanjutan guna mendukung pembangunan Kabupaten Bone Bolango.

4.1.2 Visi dan Misi

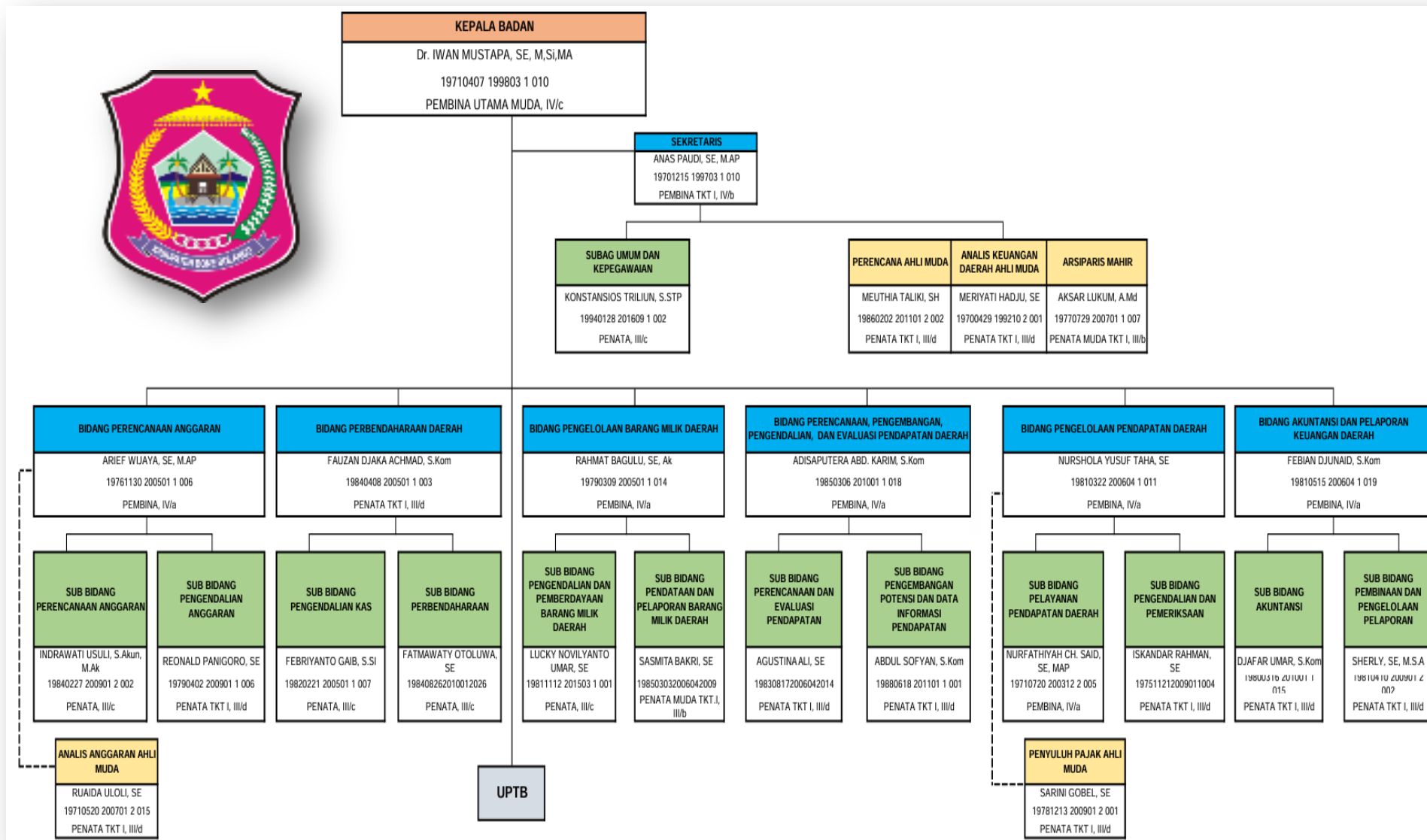
Visi

Bone Bolango Maju Cemerlang

Misi

1. Mewujudkan masyarakat modern, berbudaya dan Sejahtera;
2. Memperkokoh Infrastruktur dan pembangunan Kawasan yang berbasis pelestarian Sumber Daya Alam;
3. Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing merata dan berkeadilan;
4. Mewujudkan tata Kelola pemerintahan digital

4.1.3 Struktur Organisasi



4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Rasio Varians (Selisih) Anggaran Pendapatan

Menurut Mahmudi (2016), Rasio Varians Pendapatan adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat ketepatan antara target pendapatan yang telah direncanakan dengan realisasi pendapatan yang dicapai oleh pemerintah daerah. Rasio ini menggambarkan seberapa besar perbedaan antara anggaran pendapatan yang diestimasi dalam APBD dengan pendapatan yang benar-benar terealisasi.

Rumus yang digunakan adalah :

$$\text{Persentase Varians Pendapatan} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan} - \text{Anggaran Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

Tabel 4.1
Perhitungan Persentase Varians Pendapatan

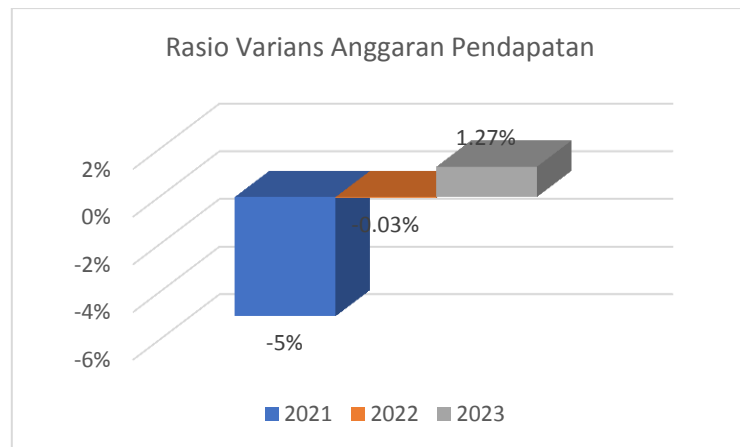
| Tahun | Realisasi Pendapatan (Rp) (a) | Anggaran Pendapatan (Rp) (b) | (a) – (b) | Hasil Perhitungan |
|-------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------|
| 2021 | 1.011.278.890.342,79 | 1.063.533.981.670 | -52.255.091.327,21 | -0,05 atau -5% |
| 2022 | 886.289.616.614,22 | 915.341.845.318,50 | -29.052.228.704,28 | -0,0003 atau -0,03% |
| 2023 | 941.908.522.583,71 | 930.076.588.224,33 | 11.831.934.359,38 | 0,0127 atau 1,27% |

Sumber: Data Olahan 2025

Berdasarkan hasil perhitungan rasio varians pendapatan pada tahun 2021, 2022, dan 2023, tingkat akurasi antara anggaran pendapatan dan realisasi pendapatan bervariasi. Pada tahun 2021, rasio varians pendapatan sebesar -5%, yang termasuk dalam kategori sangat rendah, menunjukkan realisasi pendapatan lebih kecil dari anggaran yang direncanakan. Tahun 2022 mengalami rasio varians yang sangat kecil, yakni -0,03%, yang juga masuk kategori sangat rendah, menandakan realisasi pendapatan hampir sesuai dengan anggaran. Tahun 2023 menunjukkan rasio 1,27%, yang tetap dalam kategori sangat rendah.

Berdasarkan hasil perhitungan Persenrase Varians Pendapatan Pada Badan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Bone Bolango, berikut gambaran grafiknya:

Grafik 4.1
Rasio Varians (Selisih) Anggaran Pendapatan



Grafik Rasio Varians Anggaran Pendapatan menunjukkan perbandingan antara realisasi pendapatan dan anggaran pendapatan pada tahun 2021, 2022, dan 2023. Tahun 2021 mencatat rasio varians -5%, menunjukkan bahwa realisasi pendapatan lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan. Pada tahun 2022, varians semakin kecil, yaitu -0,03%, yang mengindikasikan bahwa realisasi hampir sesuai dengan anggaran. Sementara itu, pada tahun 2023, rasio varians positif sebesar 1,27%, menandakan bahwa realisasi pendapatan sedikit lebih tinggi dari anggaran yang ditargetkan. Secara keseluruhan, varians pendapatan tetap dalam kategori "Sangat Rendah," menunjukkan perencanaan anggaran yang cukup akurat.

Berdasarkan hasil dari perhitungan rasio varians anggaran pendapatan, peneliti melakukan wawancara mendalam dengan beberapa informan guna untuk

mengkonfirmasi hasil dari perhitungan ini, berikut kutipan wawancara dengan para informan:

Kepala Badan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Bone Bolango memberikan tanggapan mengenai rasio varians (selisish) anggaran pendapatan pemerintah daerah:

Kalau saya lihat hasil perhitungannya, varians pendapatan daerah kita ini sebenarnya sudah cukup baik. Tahun 2021 dan 2022 memang ada selisih sedikit, sekitar -5% dan -3,17%, yang artinya realisasi pendapatan belum mencapai target sepenuhnya. Namun, di tahun 2023, mencatat surplus 1,27%, yang berarti pendapatan lebih besar dari yang direncanakan. Ini menunjukkan bahwa perencanaan anggaran kita sudah cukup realistis. Tentu saja, ada banyak faktor penyebabnya seperti kondisi ekonomi, kebijakan fiskal, dan tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Kami selalu menjaga agar perencanaan tetap akurat dengan mengevaluasi data dari tahun ke tahun dan berkoordinasi dengan semua pihak terkait untuk memastikan pendapatan daerah tetap stabil."

Pada kesempatan lain, Staf Perencanaan dan Penganggaran Badan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Bone Bolango juga memberikan tanggapan mengenai hasil rasio ini:

Kalau melihat angka-angkanya, selisih pendapatan dengan anggaran di Bone Bolango ini masih dalam batas yang bisa kita kendalikan. Tahun 2021 dan 2022, memang realisasi pendapatan sedikit lebih rendah dari target, tapi selisihnya tidak terlalu besar. Bahkan, di tahun 2023 kita berhasil melebihi target sebesar 1,27%. Berarti perencanaan yang kita lakukan sudah cukup tepat. Namun, kita juga sadar bahwa faktor eksternal seperti perubahan kebijakan pusat, kondisi ekonomi, dan tingkat kepatuhan masyarakat bisa menentukan hasil ini. Karena itu, kami terus melakukan penyesuaian setiap tahunnya agar target anggaran lebih realistis dan bisa benar-benar tercapai."

Sedangkan pendapat dari Auditor Internal Badan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Bone Bolango adalah:

Dari sisi audit, angka-angka ini menunjukkan bahwa perencanaan dan realisasi pendapatan daerah sudah berjalan cukup baik. Selisih yang ada masih dalam kondisi yang rendah, artinya tidak ada kesalahan besar dalam perhitungan anggaran. Memang, pada 2021 dan 2022 ada sedikit kekurangan dalam realisasi pendapatan, tapi itu masih wajar dan bisa dijelaskan dengan kondisi ekonomi saat itu. Di tahun 2023, realisasi melebihi target, artinya ada perbaikan dalam strategi penerimaan. Sehingga perlu kita pastikan adalah menjaga kestabilan ini, agar tidak terlalu bergantung pada transfer dana dari pusat dan lebih mengoptimalkan pendapatan asli daerah. Dengan begitu, kita bisa lebih mandiri dalam mengelola keuangan daerah."

Selanjutnya wawancara dengan masyarakat, dengan pertanyaan: Apakah program-program atau kegiatan pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah daerah biasanya bisa dilaksanakan sesuai dengan janji atau rencana awal yang disampaikan ke masyarakat?

"Tidak selalu. Kadang yang dijanjikan di musrenbang tidak semuanya terlaksana, mungkin karena anggarannya tidak cukup atau tertunda."

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah, Staf Perencanaan dan Penganggaran, serta Auditor Internal pada Badan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Bone Bolango, dapat disimpulkan bahwa perencanaan dan penganggaran pendapatan daerah Bone Bolango telah berjalan dengan baik, dengan selisih antara anggaran dan realisasi yang tergolong sangat rendah. Meskipun pada tahun 2021 dan 2022 realisasi pendapatan sedikit lebih rendah dari target dengan varians -5% dan -3,17%, kondisi ini masih dalam batas wajar dan disebabkan oleh faktor eksternal seperti kebijakan dan kepatuhan wajib pajak. Pada tahun 2023, realisasi pendapatan bisa melampaui anggaran sebesar 1,27%, yang menunjukkan adanya perbaikan dalam strategi penerimaan

anggaran. Untuk menjaga kondisi ini, pemerintah daerah terus melakukan evaluasi, penyesuaian target, serta penguatan strategi optimalisasi pendapatan agar tetap realistis dan sesuai dengan kondisi ekonomi daerah.

Dari perspektif masyarakat, meskipun secara angka rasio varians pendapatan tergolong sangat rendah, mereka masih merasakan bahwa beberapa program pemerintah yang direncanakan atau dijanjikan tidak selalu terealisasi sepenuhnya. Hal ini menunjukkan bahwa akurasi perencanaan anggaran belum sepenuhnya tercermin dalam persepsi manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Artinya, meskipun indikator teknis menunjukkan kinerja perencanaan yang baik, tetap diperlukan upaya penyelarasan antara perencanaan fiskal dengan implementasi program yang berdampak nyata di lapangan. Dengan demikian, keberhasilan pengelolaan varians pendapatan juga perlu diimbangi dengan perbaikan komunikasi publik, transparansi program, serta peningkatan akuntabilitas implementatif agar masyarakat dapat merasakan secara langsung hasil dari perencanaan yang telah dilakukan.

4.2.2 Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Rasio Efektif Keuangan Daerah Otonomi adalah indikator yang mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam mewujudkan pendapatan asli daerah (PAD) sesuai dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi sebenarnya di daerah tersebut. Kemampuan daerah untuk melaksanakan tugasnya dianggap efektif jika rasio yang dicapai setidaknya mencapai 100%. Namun, semakin tinggi nilai rasio efektif, semakin baik kemampuan daerah dalam menjalankan tugasnya (Halim, 2011). Berikut adalah formulasinya:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Tabel 4.2
Perhitungan Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

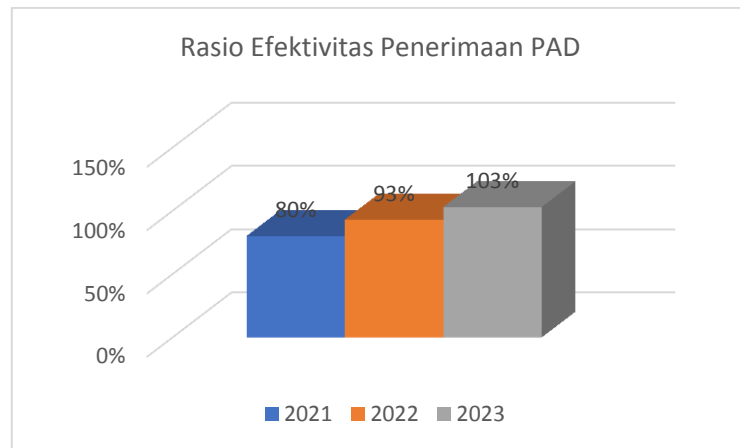
| Tahun | Realisasi Penerimaan PAD (Rp) | Target Penerimaan PAD (Rp) | (a) ÷ (b) | Persentase |
|-------|-------------------------------|----------------------------|-----------|------------|
| 2021 | 90.519.203.018,79 | 113.087.605.912 | 0,80 | 80% |
| 2022 | 90.932.057.807,22 | 97.762.449.209,50 | 0,93 | 93% |
| 2023 | 126.171.505.828,71 | 122.013.577.680,05 | 1,03 | 103% |

Sumber: Data Olahan 2025

Berdasarkan perhitungan rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bone Bolango, efektivitas penerimaan PAD menunjukkan tren yang meningkat. Pada tahun 2021, rasio efektivitas sebesar 80% yang dikategorikan sebagai kurang efektif, yang menunjukkan bahwa realisasi PAD masih jauh dari target. Tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 93%, masuk dalam kategori cukup efektif," yang artinya ada perbaikan dalam pencapaian target penerimaan PAD. Pada tahun 2023, rasio mencapai 103%, yang berarti realisasi PAD melebihi target dan masuk kategori sangat efektif. Tren ini menunjukkan adanya perbaikan dalam strategi penerimaan PAD, baik dari sisi perencanaan maupun optimalisasi sumber pendapatan daerah.

Berikut gambaran grafik rasio efektivitas penerimaan pendapatan asli daerah Badan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Bone Bolango:

Grafik 4.2
Rasio Efektivitas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah



Grafik rasio efektivitas penerimaan PAD Bone Bolango menunjukkan tren peningkatan efektivitas dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2021, rasio efektivitas sebesar 80%, yang masuk dalam kategori kurang efektif. Tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 93%, masuk kategori cukup efektif, menandakan perbaikan dalam pencapaian target. Pada tahun 2023, realisasi PAD mencapai 103%, yang berarti melebihi target dan dikategorikan sebagai sangat efektif. Grafik ini memperlihatkan bahwa pemerintah daerah semakin baik dalam mengelola dan mengoptimalkan pendapatan asli daerah, sehingga target yang ditetapkan dapat tercapai bahkan melebihi perencanaan pada tahun terakhir.

Berdasarkan hasil dari perhitungan rasio efektivitas penerimaan PAD diatas, peneliti melakukan wawancara mendalam dengan beberapa informan guna untuk mengkonfirmasi hasil dari perhitungan ini, berikut kutipan wawancara dengan para informan:

Kepala Badan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Bone Bolango memberikan tanggapan bahwa:

Memang awalnya, pencapaian masih sangat rendah karena berbagai faktor eksternal. Namun, dengan strategi yang lebih terarah, seperti pengawasan yang lebih ketat, optimalisasi sumber PAD, dan sosialisasi kepada masyarakat, hasilnya mulai menunjukkan peningkatan yang positif. Kami juga berkoordinasi dengan berbagai OPD untuk memastikan penerimaan daerah dapat ditingkatkan secara optimal. Kami berkomitmen untuk terus mempertahankan dan meningkatkan efektivitas ini dengan menggali potensi pendapatan baru dan meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak."

Pada kesempatan lain, Staf Perencanaan dan Penganggaran Badan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Bone Bolango juga memberikan tanggapan mengenai hasil rasio ini:

Peningkatan efektivitas penerimaan PAD ini adalah hasil dari kerja keras banyak pihak. Tahun 2021 memang masih ada tantangan, karena kondisi ekonomi yang belum stabil pasca pandemi. Tapi dengan evaluasi yang lebih baik dan strategi yang tepat, tahun 2022 kami mulai meningkatkan usaha kami, dan di 2023, realisasi PAD melampaui target. Kami lebih realistis dalam menyusun target, mempertimbangkan potensi penerimaan yang riil, serta menyesuaikan kebijakan agar lebih fleksibel. Kami akan terus menyempurnakan sistem perencanaan dengan data yang lebih akurat agar PAD bisa terus meningkat."

Sedangkan pendapat dari Auditor Internal Badan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Bone Bolango adalah:

Dari sisi audit, kenaikan efektivitas PAD ini memperlihatkan adanya perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah. Tahun 2021 masih tergolong kurang efektif, tapi dengan evaluasi dan perbaikan sistem pemungutan, tahun 2022 sudah mulai mendekati target, dan akhirnya di 2023 malah melebihi target. Artinya ada peningkatan dalam pemungutan pajak dan retribusi serta pengelolaan sumber PAD yang lebih baik. Kami perlu memperhatikan konsistensi kedepan nanti. Jangan sampai tahun-tahun berikutnya justru menurun. Kami juga perlu transparan dalam perencanaan, pengawasan ketat, dan inovasi dalam menggali sumber PAD baru harus terus dilakukan agar kondisi ini bisa bertahan."

Selanjutnya wawancara dengan pihak masyarakat, dengan pertanyaan: Apakah pemerintah daerah sudah memanfaatkan potensi sumber pendapatan dari masyarakat atau lingkungan sekitar secara maksimal dan adil, misalnya dari pajak, retribusi, atau usaha lokal?

“Masih bisa ditingkatkan. Banyak potensi yang belum tergarap, seperti pasar dan UMKM. Tapi pemungutan pajak sudah mulai tertib.”

Peningkatan efektivitas penerimaan PAD Bone Bolango dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan oleh pemerintah daerah mulai membuahkan hasil. Awalnya, pencapaian masih menghadapi tantangan akibat berbagai faktor eksternal, namun dengan pengawasan yang lebih ketat, optimalisasi sumber pendapatan, serta sosialisasi kepada masyarakat, efektivitas penerimaan semakin meningkat. Evaluasi dalam perencanaan anggaran juga bisa memastikan target yang lebih realistis dan fleksibel sesuai dengan kondisi ekonomi daerah. Pemerintah berkomitmen untuk mempertahankan tren positif ini dengan meningkatkan transparansi, memperbaiki sistem pemungutan, serta menggali potensi pendapatan baru agar PAD terus tumbuh.

Sementara itu, dari hasil wawancara dengan masyarakat, terdapat pandangan bahwa meskipun ada perbaikan dalam sistem pemungutan PAD, pemerintah daerah dinilai masih memiliki ruang untuk lebih maksimal dalam menggali potensi lokal. Beberapa potensi seperti pasar, UMKM, dan retribusi sektor informal dianggap belum tergarap secara optimal. Di sisi lain, masyarakat juga mulai merasakan peningkatan keteraturan dan ketertiban dalam pemungutan

pajak dan retribusi daerah, yang menunjukkan adanya kemajuan dalam sistem pengelolaan PAD.

4.2.3 Rasio Varians Belanja

Rasio Varians Belanja adalah indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana realisasi belanja daerah sesuai dengan anggaran yang telah direncanakan. Rasio ini diperoleh dengan membandingkan perbedaan antara anggaran belanja yang telah ditetapkan dengan realisasi belanja yang terjadi, kemudian dinyatakan dalam bentuk persentase (Halim, 2016). Berikut rumus yang digunakan:

$$\begin{array}{l} \text{Persentase} \\ \text{Varians} \\ \text{Belanja} \end{array} = \frac{\text{Realisasi Belanja} - \text{Anggaran Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Tabel 4.3
Perhitungan Rasio Varians

| Tahun | Realisasi Belanja Daerah (Rp) (a) | Anggaran Belanja (Rp) (b) | (a) – (b) | Hasil Perhitungan |
|-------|-----------------------------------|---------------------------|------------------|-------------------|
| 2021 | 970.627.002.491,02 | 1.062.878.884.547,48 | -92.251.882.056 | -0,08 atau -8% |
| 2022 | 776.963.401.190,40 | 910.632.173.316,88 | -133.668.772.126 | -0,14 atau -14% |
| 2023 | 816.767.049.389,00 | 859.920.055.504,80 | -43.153.006.116 | -0,05 atau -5% |

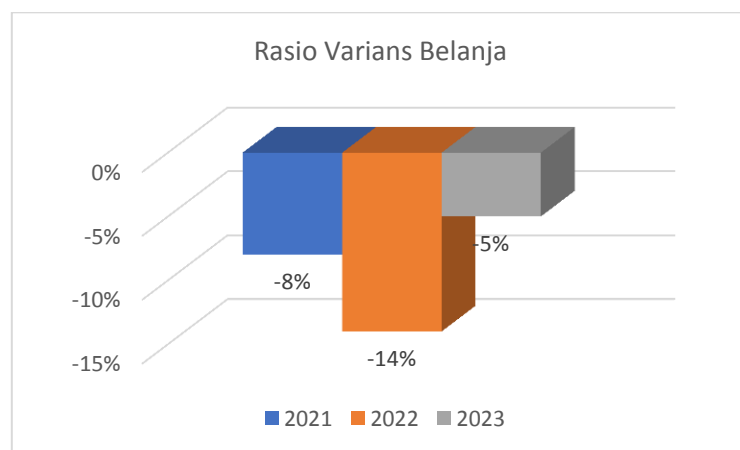
Sumber: Data Olahan 2025

Berdasarkan hasil perhitungan rasio varians belanja, realisasi belanja daerah Bone Bolango cenderung lebih rendah dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Pada tahun 2021, realisasi belanja mengalami selisih cukup besar dibandingkan anggaran yang direncanakan, menunjukkan adanya sisa anggaran yang tidak digunakan sepenuhnya. Selisih ini semakin melebar pada tahun 2022, menandakan bahwa belanja daerah masih belum optimal dalam penyerapan anggaran yang dialokasikan. Namun, pada tahun 2023, terjadi perbaikan dengan selisih yang lebih kecil, menunjukkan bahwa pengelolaan

belanja membaik dan lebih mendekati anggaran yang direncanakan. Hal ini mencerminkan adanya peningkatan dalam efektivitas perencanaan dan pelaksanaan belanja daerah.

Berikut grafik dari hasil perhitungan rasio:

Grafik 4.3
Rasio Varians Belanja



Grafik tersebut menunjukkan rasio varians belanja pemerintah daerah Bone Bolango dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2021, realisasi belanja lebih rendah dari anggaran yang telah ditetapkan dengan selisih sebesar -8%, yang menunjukkan adanya sisa anggaran yang tidak terpakai secara optimal. Kondisi ini semakin memburuk pada tahun 2022, di mana selisih antara anggaran dan realisasi belanja meningkat menjadi -14%, menandakan bahwa penggunaan anggaran masih belum maksimal. Namun, pada tahun 2023, terdapat perbaikan dengan selisih yang mengecil menjadi -5%, menunjukkan bahwa penyerapan anggaran mulai lebih terkendali dan mendekati jumlah yang telah direncanakan.

Berdasarkan hasil dari perhitungan Rasio Varians Belanja diatas, peneliti melakukan wawancara mendalam dengan beberapa informan guna untuk

mengkonfirmasi hasil dari perhitungan ini, berikut kutipan wawancara dengan para informan:

Kepala Badan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Bone Bolango memberikan tanggapan bahwa:

Kami menyadari bahwa dalam beberapa tahun terakhir, realisasi belanja daerah masih belum sepenuhnya sesuai dengan anggaran yang direncanakan. Kadang ada kendala di lapangan, seperti proses administrasi yang memakan waktu atau perubahan kebijakan yang datang mendadak dari pusat, sehingga beberapa program harus ditunda atau disesuaikan. Namun, kami sudah mulai melakukan perbaikan, terutama dengan meningkatkan koordinasi antar OPD agar proses pengadaan dan pelaksanaan kegiatan bisa lebih cepat. Kami ingin memastikan bahwa setiap anggaran yang sudah direncanakan benar-benar bisa digunakan untuk kepentingan masyarakat tanpa ada keterlambatan."

Pada kesempatan lain, Staf Perencanaan dan Penganggaran Badan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Bone Bolango juga memberikan tanggapan mengenai hasil rasio ini:

Kalau dilihat, selisih antara anggaran dan realisasi belanja ini memang disebabkan oleh berbagai faktor. Kadang ada proyek yang tertunda, ada juga efisiensi anggaran yang dilakukan agar dana bisa digunakan dengan bijak. Tahun 2022 memang agak berat karena ada beberapa kendala teknis, tapi di 2023 kami sudah mulai lebih baik. Kami ingin memastikan bahwa anggaran yang disusun lebih realistis, sehingga apa yang direncanakan benar-benar bisa direalisasikan. Kami juga akan mempercepat proses pencairan dana agar program-program bisa berjalan tepat waktu dan manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat lebih cepat."

Sedangkan pendapat dari Auditor Internal Badan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Bone Bolango adalah:

Dari sisi audit, saya melihat bahwa ada beberapa alasan kenapa anggaran belanja tidak terserap sepenuhnya. Proses perencanaan yang belum sepenuhnya matang, dan ada faktor eksternal seperti perubahan kebijakan yang menghambat eksekusi program. Tapi ada juga perbaikan, terutama di tahun terakhir, dimana selisihnya sudah

mulai mengecil. Anggaran harus lebih disusun dengan perhitungan yang cermat, dan setiap OPD perlu lebih disiplin dalam mengeksekusi anggarannya agar tidak ada dana yang tersisa."

Selanjutnya wawancara dengan pihak masyarakat, dengan pertanyaan: Selama ini, apakah anggaran yang direncanakan untuk pembangunan dan layanan publik seringkali tidak terealisasi atau hanya sebagian saja yang benar-benar dilaksanakan?

"Iya, ada program yang ditunda atau tidak jadi dilaksanakan, seperti perbaikan jalan atau bantuan usaha yang dijanjikan."

Berdasarkan hasil wawancara, realisasi belanja daerah Bone Bolango masih mengalami kendala dalam penyerapan anggaran, terutama akibat keterlambatan administrasi, perubahan kebijakan dari pemerintah pusat, serta adanya efisiensi dalam pengeluaran. Pada tahun sebelumnya, beberapa program mengalami penundaan, menyebabkan realisasi belanja lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan. Namun, pemerintah daerah telah melakukan berbagai perbaikan, seperti meningkatkan koordinasi antar OPD, mempercepat proses pencairan dana, dan menyusun anggaran yang lebih realistis. Auditor juga menyoroti pentingnya disiplin dalam pelaksanaan anggaran agar tidak ada dana yang tidak termanfaatkan dengan baik.

Dari sudut pandang masyarakat, masih terdapat persepsi bahwa beberapa program pembangunan atau bantuan sosial yang direncanakan tidak selalu terlaksana atau hanya sebagian saja yang benar-benar dijalankan. Hal ini memperkuat temuan bahwa adanya varians belanja turut dirasakan dalam bentuk ketidaksesuaian antara rencana dan realisasi program di tingkat lapangan.

Masyarakat juga mencatat adanya penundaan atau ketidakjelasan pelaksanaan kegiatan yang sebelumnya telah dijanjikan dalam forum-forum seperti musrenbang. Ini menunjukkan bahwa walaupun dari sisi pengelolaan teknokratis rasio varians belanja mulai membaik, harapan dan ekspektasi masyarakat terhadap ketercapaian program tetap tinggi dan menuntut konsistensi pelaksanaan di lapangan.

4.2.4 Rasio Efisiensi Belanja Daerah

Menurut Mahmudi (2016), efisiensi belanja daerah adalah ukuran yang digunakan untuk menilai seberapa optimal pemerintah daerah dalam menggunakan anggarannya untuk mencapai hasil atau output yang diinginkan. Efisiensi ini dilihat dari seberapa besar sumber daya (anggaran) yang digunakan untuk menghasilkan layanan publik dan mencapai tujuan pembangunan. Berikut adalah formulasinya:

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Tabel 4.4
Perhitungan Rasio Efisiensi Belanja

| Tahun | Realisasi Belanja (Rp) (a) | Target Belanja (Rp) (b) | (a) ÷ (b) | Persentase |
|-------|-------------------------------|----------------------------|-----------|------------|
| 2021 | 970.627.002.491,02 | 1.062.878.884.547,48 | 0,91 | 91% |
| 2022 | 776.963.401.190,40 | 910.632.173.316,88 | 0,85 | 85% |
| 2023 | 816.767.049.389,00 | 859.920.055.504,80 | 0,94 | 94% |

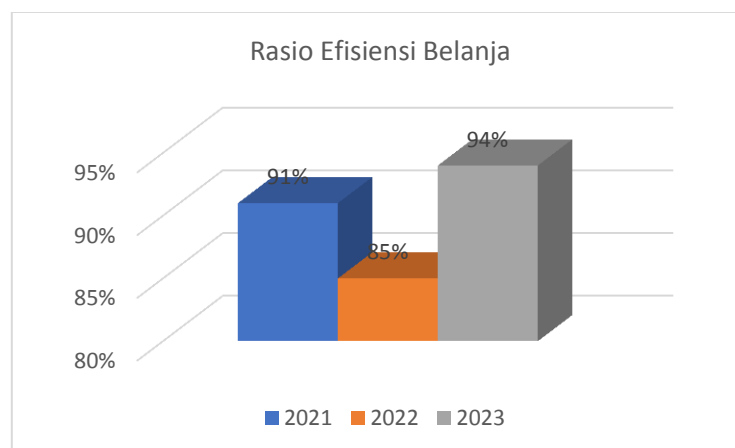
Sumber: Data Olahan 2025

Berdasarkan hasil perhitungan rasio efisiensi belanja, dapat disimpulkan bahwa efisiensi penggunaan anggaran belanja daerah Bone Bolango mengalami perubahan setiap tahunnya. Pada tahun 2021, rasio efisiensi belanja mencapai

91%, yang masuk dalam kategori sangat efisien, menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran telah digunakan secara optimal. Namun, pada tahun 2022, efisiensi belanja menurun menjadi 85%, yang dikategorikan sebagai efisien, menandakan adanya anggaran yang tidak terserap sepenuhnya. Pada tahun 2023, efisiensi belanja meningkat kembali menjadi 94%, tetap dalam kategori sangat efisien, yang menunjukkan perbaikan dalam pengelolaan anggaran. Secara keseluruhan, meskipun terjadi sedikit penurunan pada tahun 2022, tren ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah secara bertahap meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan anggaran belanja, dengan hasil yang semakin optimal di tahun terakhir.

Berikut grafik dari hasil perhitungan rasio:

Grafik 4.4
Rasio Efisiensi Belanja



Grafik rasio efisiensi belanja menunjukkan bahwa penggunaan anggaran daerah Bone Bolango mengalami perubahan dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2021, efisiensi belanja mencapai 91%, menandakan bahwa sebagian besar anggaran telah digunakan secara optimal. Namun, pada tahun 2022, efisiensi belanja menurun menjadi 85%, yang menunjukkan adanya anggaran yang tidak terserap

secara maksimal. Kondisi ini membaik pada tahun 2023, dengan efisiensi belanja meningkat menjadi 94%, mencerminkan pengelolaan anggaran yang lebih efektif dibandingkan tahun sebelumnya. Secara keseluruhan, grafik ini menunjukkan adanya perbaikan dalam penggunaan anggaran, dengan tren peningkatan efisiensi yang semakin baik di tahun terakhir.

Berdasarkan hasil dari perhitungan Rasio Efisiensi Belanja diatas, peneliti melakukan wawancara mendalam dengan beberapa informan guna untuk mengkonfirmasi hasil dari perhitungan ini, berikut kutipan wawancara dengan para informan:

Kepala Badan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Bone Bolango memberikan tanggapan bahwa:

"Kami menyadari bahwa efisiensi belanja daerah sempat mengalami penurunan pada tahun 2022. Itu terjadi karena ada beberapa kendala seperti keterlambatan administrasi, perubahan kebijakan, dan beberapa program yang harus ditunda. Namun, berusaha memperbaikinya. Pada tahun 2023, kami mulai memperbaiki cara kerja, mempercepat proses pencairan dana, dan lebih aktif berkoordinasi dengan OPD agar program berjalan lebih lancar. Hasilnya, efisiensi belanja meningkat lagi. Kami akan terus memastikan anggaran yang sudah disusun benar-benar digunakan secara optimal dan bermanfaat bagi masyarakat."

Pada kesempatan lain, Staf Perencanaan dan Penganggaran Badan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Bone Bolango juga memberikan tanggapan mengenai hasil rasio ini:

"Ada beberapa program yang tidak bisa dijalankan sesuai jadwal, ada juga perubahan prioritas yang membuat anggaran tidak terserap penuh. Berdasarkan pengalaman itu di tahun 2023, kami lebih teliti dalam menyusun anggaran, lebih sering melakukan evaluasi, dan memastikan setiap program bisa dilaksanakan tepat waktu. Hasilnya, efisiensi belanja meningkat. Kami ingin lebih memperketat

perencanaan agar tidak ada lagi dana yang terbuang atau tidak terserap dengan baik."

Sedangkan pendapat dari Auditor Internal Badan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Bone Bolango adalah:

"Pada tahun 2022 memang ada hambatan, hal itu disebabkan prosedur yang belum sepenuhnya efektif dan ada kendala di lapangan. Tahun 2023 sudah mulai ada peningkatan efisiensi. Pemerintah daerah mulai lebih disiplin dalam mengeksekusi anggaran. Dan yang paling penting adalah menjaga konsistensi, pengelolaan anggaran harus lebih transparan, program harus direncanakan lebih matang, dan setiap OPD harus benar-benar menjalankan tugasnya dengan baik agar anggaran yang ada bisa dimanfaatkan sebaik mungkin untuk kepentingan masyarakat."

Selanjutnya wawancara dengan pihak masyarakat, dengan pertanyaan: Apakah penggunaan anggaran pemerintah daerah sudah terasa manfaatnya dan tidak terkesan pemborosan atau sia-sia?

"Sudah lumayan terasa, tapi kadang ada proyek yang habis dana besar tapi manfaatnya kecil atau tidak merata."

Berdasarkan hasil wawancara, penurunan efisiensi belanja pada tahun 2022 disebabkan oleh keterlambatan administrasi, perubahan kebijakan, dan beberapa program yang tidak berjalan sesuai rencana, sehingga anggaran tidak terserap secara optimal. Namun, pemerintah daerah segera melakukan perbaikan dengan mempercepat pencairan dana, meningkatkan koordinasi antar OPD, serta melakukan evaluasi berkala terhadap perencanaan dan pelaksanaan program. Hasilnya, pada tahun 2023 efisiensi belanja kembali meningkat, menunjukkan adanya peningkatan dalam pengelolaan anggaran. Pemerintah berkomitmen untuk menjaga konsistensi ini dengan perencanaan yang lebih matang, transparansi

dalam pengelolaan anggaran, serta memastikan setiap anggaran yang dialokasikan benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Dari sisi masyarakat, terdapat pandangan bahwa meskipun program-program pemerintah mulai terasa manfaatnya, masih ditemukan sejumlah kegiatan yang dinilai tidak memberikan dampak yang sebanding dengan besarnya anggaran yang digunakan. Beberapa warga menyampaikan bahwa ada proyek yang terlihat besar secara anggaran, tetapi manfaatnya kurang merata atau tidak dirasakan langsung oleh masyarakat. Hal ini mencerminkan bahwa efisiensi belanja, meskipun secara angka menunjukkan kinerja yang baik, perlu juga diukur dari aspek kebermanfaatan nyata dan pemerataan dampak pembangunan.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Pembahasan Rasio Varians (Selisih) Anggaran Pendapatan

Rasio varians pendapatan merupakan indikator penting dalam mengevaluasi kinerja perencanaan anggaran pemerintah daerah, khususnya dalam hal estimasi dan realisasi pendapatan. Berdasarkan rumus yang dikemukakan oleh Mahmudi (2016), rasio ini dihitung dari selisih antara realisasi penerimaan dengan anggaran pendapatan, kemudian dibagi dengan anggaran pendapatan dan dikalikan 100%. Hasil perhitungan rasio varians pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango selama tiga tahun terakhir menunjukkan fluktuasi yang menarik untuk dianalisis secara kritis.

Pada tahun 2021, realisasi pendapatan sebesar Rp1.011.278.890.342,79 lebih rendah dibandingkan anggaran sebesar Rp1.063.533.981.670,00. Selisih negatif sebesar Rp52.255.091.327,21 menghasilkan rasio varians sebesar -5%. Ini

menunjukkan bahwa terdapat deviasi yang cukup signifikan antara target yang telah dirancang dalam APBD dengan hasil aktual, sehingga mengindikasikan adanya overestimasi dalam perencanaan pendapatan atau kemungkinan adanya faktor eksternal yang menyebabkan tidak tercapainya target, seperti perubahan kebijakan pusat, fluktuasi penerimaan transfer, atau penurunan potensi pendapatan asli daerah (PAD).

Tahun 2022 menunjukkan perbaikan dalam akurasi perencanaan, di mana rasio varians tercatat sebesar -0,03%. Realisasi pendapatan sebesar Rp886.289.616.614,22 hanya sedikit di bawah anggaran sebesar Rp915.341.845.318,50, dengan selisih negatif Rp29.052.228.704,28. Rasio ini tergolong sangat kecil, menunjukkan tingkat kehati-hatian dan realistis dalam perencanaan anggaran. Hal ini mencerminkan bahwa proses penyusunan APBD tahun 2022 kemungkinan telah memperhitungkan tren historis dan kondisi ekonomi aktual secara lebih akurat.

Pada tahun 2023, tren membaik terus berlanjut, bahkan realisasi pendapatan justru melebihi target anggaran. Terdapat selisih positif sebesar Rp11.831.934.359,38 antara realisasi sebesar Rp941.908.522.583,71 dan anggaran Rp930.076.588.224,33, menghasilkan rasio varians sebesar 1,27%. Kelebihan ini menunjukkan potensi keberhasilan dalam menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang melebihi ekspektasi, atau adanya penerimaan tak terduga seperti dana transfer tambahan, penyesuaian target PAD, atau peningkatan intensitas pemungutan.

Perhitungan rasio varians ini memberikan gambaran tentang efektivitas pengelolaan pendapatan daerah. Selisih yang terjadi dalam tiga tahun terakhir menunjukkan adanya perbaikan dalam proses estimasi dan perencanaan keuangan daerah. Tahun 2021 mengalami defisit yang cukup signifikan, kemungkinan dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kondisi ekonomi yang belum stabil pasca pandemi atau kebijakan fiskal yang berubah. Pada tahun 2022, selisih semakin kecil, yang menunjukkan adanya penyesuaian dalam strategi pengelolaan pendapatan. Kemudian, pada tahun 2023, peningkatan realisasi pendapatan yang melampaui anggaran mengindikasikan perbaikan dalam strategi pengelolaan pendapatan daerah, baik dari sisi administrasi maupun kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, hasil perhitungan ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dalam menyusun strategi pendapatan daerah.

Hasil wawancara dengan Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Bone Bolango mengonfirmasi bahwa varians pendapatan yang terjadi masih dalam batas wajar. Menurutnya, perencanaan anggaran sudah cukup realistis, dan selisih yang terjadi sebagian besar disebabkan oleh faktor eksternal seperti kondisi ekonomi serta kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Ia juga menyoroti pentingnya evaluasi berkala dalam perencanaan anggaran agar lebih akurat. Pernyataan ini sejalan dengan hasil perhitungan yang menunjukkan perbedaan kecil antara anggaran dan realisasi dalam tiga tahun terakhir. Hal ini menandakan bahwa meskipun ada tantangan dalam pengumpulan pendapatan, pemerintah daerah telah melakukan upaya untuk memastikan ketepatan anggaran dengan realisasi yang dicapai.

Selain itu, tanggapan dari Staf Perencanaan dan Penganggaran juga menunjukkan optimisme terhadap pengelolaan pendapatan daerah. Ia menekankan bahwa selisih yang terjadi di tahun 2021 dan 2022 masih dalam batas yang dapat dikendalikan, sementara di tahun 2023 realisasi pendapatan yang melebihi target menunjukkan bahwa perencanaan semakin membaik. Faktor eksternal seperti perubahan kebijakan pusat dan kondisi ekonomi memang menjadi tantangan tersendiri, namun dengan penyesuaian strategi setiap tahunnya, pemerintah daerah dapat mencapai target yang lebih realistis. Hal ini menunjukkan bahwa dalam proses perencanaan anggaran, fleksibilitas dalam menyesuaikan proyeksi pendapatan dengan dinamika ekonomi sangat diperlukan agar target dapat tercapai secara optimal.

Dari perspektif audit internal, varians pendapatan yang terjadi tidak menunjukkan adanya kesalahan besar dalam perhitungan anggaran. Auditor internal menilai bahwa perencanaan pendapatan daerah sudah berjalan cukup baik, meskipun masih ada beberapa tantangan dalam memastikan realisasi pendapatan sesuai dengan anggaran. Tahun 2021 dan 2022 mencatat defisit kecil yang masih dapat dijelaskan oleh kondisi ekonomi saat itu, sementara tahun 2023 menunjukkan perbaikan dalam strategi penerimaan yang menghasilkan surplus pendapatan. Auditor juga menekankan pentingnya mengurangi ketergantungan terhadap transfer dana dari pusat dan lebih mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) agar keuangan daerah lebih mandiri. Ini menunjukkan bahwa selain akurasi dalam perencanaan, diversifikasi sumber pendapatan juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan stabilitas keuangan daerah.

Berdasarkan keseluruhan analisis, rasio varians pendapatan pada Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Bone Bolango menunjukkan tren positif dalam tiga tahun terakhir. Meskipun masih terdapat selisih antara anggaran dan realisasi pendapatan, angka yang diperoleh menunjukkan bahwa selisih tersebut berada dalam batas yang dapat diterima. Perencanaan yang lebih akurat, strategi penerimaan yang lebih baik, serta evaluasi berkala menjadi faktor kunci dalam meningkatkan ketepatan anggaran di masa mendatang. Untuk memperkuat stabilitas keuangan daerah, diperlukan langkah-langkah strategis seperti peningkatan efisiensi dalam pengelolaan pendapatan, penguatan koordinasi antar instansi terkait, serta optimalisasi sumber pendapatan daerah agar tidak terlalu bergantung pada transfer dari pemerintah pusat. Dengan demikian, rasio varians pendapatan dapat terus ditekan ke tingkat yang lebih rendah, mendukung efektivitas pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik.

Dalam membandingkan hasil penelitian ini dengan teori yang relevan, kita dapat merujuk pada konsep rasio varians pendapatan menurut Mahmudi (2016). Mahmudi menyatakan bahwa semakin kecil selisih antara anggaran yang direncanakan dengan realisasi pendapatan, maka semakin baik tingkat akurasi perencanaan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Jika varians negatif terlalu besar, berarti ada kelemahan dalam perencanaan atau faktor eksternal yang menghambat pencapaian target pendapatan. Berdasarkan hasil penelitian ini, rasio varians pendapatan di Bone Bolango menunjukkan tingkat akurasi yang cukup baik, dengan selisih negatif yang kecil pada tahun 2021 (-5%) dan 2022 (-0,03%), serta surplus pendapatan pada tahun 2023 (1,27%). Ini sejalan

dengan teori Mahmudi, yang menunjukkan bahwa Bone Bolango telah berhasil dalam menjaga akurasi anggarannya dengan selisih varians yang sangat rendah. Hal ini menandakan bahwa meskipun terdapat fluktuasi ekonomi atau kebijakan fiskal yang berubah, pemerintah daerah telah mampu menyesuaikan strategi perencanaan pendapatannya agar tetap akurat.

Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu, hasil penelitian ini memiliki kesamaan dengan studi yang dilakukan oleh Sari dan Susanto (2019) tentang efektivitas perencanaan anggaran di beberapa daerah di Indonesia. Dalam penelitiannya, mereka menemukan bahwa daerah dengan sistem perencanaan yang baik cenderung memiliki rasio varians pendapatan yang rendah, yang menunjukkan tingkat akurasi yang tinggi dalam estimasi pendapatan. Salah satu daerah dalam penelitian mereka mencatat varians negatif sebesar -6% hingga -3% dalam beberapa tahun, yang hampir serupa dengan hasil penelitian ini pada tahun 2021 dan 2022. Namun, dalam penelitian mereka, sebagian besar daerah mengalami defisit dalam realisasi pendapatan, sedangkan pada penelitian ini, Bone Bolango berhasil mencatat surplus pendapatan pada tahun 2023.

4.3.2 Pembahasan Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Rasio efektivitas PAD merupakan indikator utama dalam menilai sejauh mana pemerintah daerah mampu merealisasikan potensi penerimaan daerah yang telah ditetapkan dalam APBD. Menurut Halim (2011), rasio ini merefleksikan kapasitas fiskal aktual pemerintah daerah dalam membiayai kebutuhan belanja daerah secara mandiri tanpa terlalu bergantung pada dana transfer dari pusat.

Suatu daerah dikatakan efektif apabila realisasi PAD mencapai atau melebihi target, yakni minimal 100%.

Pada tahun 2021, realisasi PAD Pemerintah Kabupaten Bone Bolango sebesar Rp90.519.203.018,79 hanya mampu memenuhi 80% dari target sebesar Rp113.087.605.912. Nilai ini dikategorikan sebagai kurang efektif, mencerminkan belum optimalnya pemanfaatan potensi PAD yang tersedia. Penyebabnya dapat bersumber dari lemahnya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah, terbatasnya inovasi dalam menggali sumber-sumber PAD baru, serta kemungkinan lemahnya pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak dan retribusi. Hal ini juga bisa mencerminkan kurangnya koordinasi antar perangkat daerah teknis dalam optimalisasi penerimaan PAD.

Pada tahun 2022, efektivitas PAD meningkat menjadi 93%, dengan realisasi sebesar Rp90.932.057.807,22 dari target Rp97.762.449.209,50. Meskipun belum mencapai tingkat efektivitas penuh, peningkatan ini patut diapresiasi karena menunjukkan adanya perbaikan kinerja fiskal lokal. Hal ini dapat diartikan sebagai hasil dari strategi perencanaan yang lebih realistis, peningkatan kepatuhan wajib pajak, atau keberhasilan pemerintah daerah dalam memperbaiki sistem pemungutan dan pengelolaan PAD. Kategori ini masuk dalam klasifikasi cukup efektif, yang menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah mulai berhasil menjembatani kesenjangan antara potensi fiskal dan target realisasi.

Perkembangan yang paling signifikan terlihat pada tahun 2023, di mana realisasi PAD sebesar Rp126.171.505.828,71 berhasil melampaui target sebesar

Rp122.013.577.680,05, menghasilkan rasio efektivitas sebesar 103%. Hal ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Kabupaten Bone Bolango telah berhasil melakukan efisiensi dan inovasi dalam menggali potensi PAD, bahkan melebihi proyeksi awal. Capaian ini masuk dalam kategori sangat efektif, menandakan tingkat kemampuan fiskal lokal yang semakin baik. Peningkatan ini kemungkinan besar merupakan hasil dari perbaikan sistem digitalisasi pajak dan retribusi, peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban membayar pajak, serta kerja sama lintas sektoral dalam pengawasan dan penegakan peraturan daerah.

Dari hasil perhitungan, terlihat bahwa efektivitas penerimaan PAD terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun awal penelitian, penerimaan PAD masih jauh dari target yang telah ditetapkan, menandakan bahwa strategi pemungutan dan pengelolaan pendapatan daerah belum berjalan secara optimal. Namun, pemerintah daerah terus melakukan perbaikan dengan meningkatkan efektivitas dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah, memperbaiki sistem administrasi, serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan strategi yang lebih baik, realisasi PAD terus mengalami perbaikan, hingga akhirnya melampaui target pada tahun terakhir penelitian. Ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD sudah mulai memberikan hasil yang positif, meskipun masih perlu dijaga konsistensinya agar efektivitas ini dapat terus berlanjut di masa depan.

Hasil wawancara dengan Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Bone Bolango mengonfirmasi bahwa efektivitas PAD mengalami peningkatan berkat berbagai kebijakan yang diterapkan. Ia menjelaskan bahwa pada tahun

awal penelitian, pencapaian PAD masih rendah akibat beberapa faktor eksternal, seperti kondisi ekonomi yang kurang stabil serta kepatuhan wajib pajak yang masih perlu ditingkatkan. Namun, pemerintah daerah mulai melakukan berbagai perbaikan, seperti memperketat pengawasan terhadap sumber PAD, meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat, serta memperbaiki koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dengan adanya upaya ini, efektivitas PAD mulai meningkat secara signifikan. Kepala Badan Keuangan juga menekankan bahwa mereka berkomitmen untuk terus menggali potensi pendapatan baru dan meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak agar penerimaan daerah semakin optimal.

Staf Perencanaan dan Penganggaran Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Bone Bolango juga memberikan pandangan terkait peningkatan efektivitas PAD dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, peningkatan ini bukan terjadi secara tiba-tiba, tetapi merupakan hasil dari evaluasi yang terus dilakukan oleh pemerintah daerah. Pada tahun awal, masih banyak tantangan yang dihadapi, seperti belum optimalnya sistem pemungutan dan penyesuaian kebijakan yang kurang fleksibel. Namun, dengan perbaikan dalam penyusunan anggaran dan target yang lebih realistis, pemerintah mulai menemukan jalan yang lebih efektif dalam meningkatkan PAD. Selain itu, strategi penyesuaian kebijakan yang lebih fleksibel juga membantu pemerintah daerah dalam mencapai target yang lebih optimal.

Dari perspektif audit, peningkatan efektivitas PAD menunjukkan adanya perbaikan yang signifikan dalam pengelolaan keuangan daerah. Auditor internal

menyoroti bahwa pada tahun awal penelitian, efektivitas masih tergolong rendah, tetapi dengan adanya evaluasi dan peningkatan sistem pemungutan, efektivitas mulai membaik. Informan menjelaskan bahwa peningkatan efektivitas PAD ini bukan hanya hasil dari perencanaan yang lebih baik, tetapi juga dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan pengawasan pada pelaksanaan kebijakan pajak dan retribusi. Auditor menegaskan bahwa untuk menjaga konsistensi efektivitas ini, diperlukan transparansi yang lebih tinggi dalam perencanaan keuangan, pengawasan yang lebih ketat terhadap pemungutan PAD, serta inovasi dalam menggali sumber pendapatan baru agar ketergantungan dengan transfer dana pusat dapat dikurangi.

Berdasarkan hasil wawancara dan perhitungan rasio efektivitas PAD, dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah Bone Bolango telah menunjukkan perbaikan dalam mengoptimalkan sumber pendapatan asli daerah. Yang pada awalnya, efektivitas masih rendah karena berbagai kendala, namun dengan strategi yang lebih baik, efektivitas PAD mulai meningkat hingga akhirnya melampaui target. Untuk menjaga tren positif ini, pemerintah daerah disarankan untuk terus meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait kewajiban pajak, memperkuat sistem administrasi dan digitalisasi dalam pemungutan PAD, serta menggali potensi pendapatan baru dari sektor yang belum teroptimalkan.

Hasil penelitian ini jika dibandingkan dengan teori yang relevan, konsep rasio efektivitas keuangan daerah otonomi menurut Halim (2011) yang menjelaskan bahwa efektivitas keuangan daerah dapat diukur melalui rasio antara realisasi dan target penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jika rasio

mencapai atau melampaui angka seratus persen, maka dapat dikatakan bahwa daerah tersebut telah efektif dalam mengelola pendapatannya. Hasil penelitian ini memiliki kesamaan dengan studi yang dilakukan oleh Sutrisno dan Wibowo (2018) tentang efektivitas PAD di beberapa daerah di Indonesia. Hasil penelitian ditemukan bahwa efektivitas PAD sangat bergantung pada strategi pemerintah daerah dalam mengelola sumber pendapatannya, banyak daerah yang masih belum mampu mencapai tingkat efektivitas yang optimal, dengan sebagian besar hanya mendekati angka target tetapi belum melampauinya.

4.3.3 Pembahasan Rasio Varians Belanja

Rasio varians belanja merupakan salah satu instrumen evaluatif dalam analisis kinerja anggaran daerah yang menunjukkan derajat kesesuaian antara anggaran belanja yang telah direncanakan dengan realisasi belanja yang dilaksanakan. Menurut Halim (2016), rasio ini mengindikasikan kemampuan pemerintah daerah dalam menyerap anggaran secara optimal. Selisih negatif antara realisasi dan anggaran mencerminkan under-spending atau tidak terserapnya sebagian anggaran yang telah dialokasikan, yang berpotensi berdampak pada tertundanya program pembangunan atau pelayanan publik.

Pada tahun 2021, realisasi belanja sebesar Rp970.627.002.491,02 masih berada di bawah anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.062.878.884.547,48. Selisih negatif sebesar Rp92.251.882.056 menghasilkan rasio varians sebesar - 8%, yang mencerminkan tingkat serapan anggaran yang rendah. Under-spending ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti keterlambatan pelaksanaan program, kendala dalam proses pengadaan barang dan jasa, atau lemahnya

kapasitas teknis pelaksana anggaran. Fenomena ini juga dapat mengindikasikan adanya perencanaan yang terlalu optimistik atau kurang realistis dalam penetapan alokasi belanja.

Tahun 2022 mencatat rasio varians belanja sebesar -14%, yang lebih buruk dibandingkan tahun sebelumnya. Realisasi belanja Rp776.963.401.190,40 dibandingkan dengan anggaran sebesar Rp910.632.173.316,88 menunjukkan selisih negatif Rp133.668.772.126. Angka ini menandakan penurunan kinerja penyerapan anggaran dan mencerminkan adanya kelemahan struktural dalam pengelolaan belanja daerah. Selain faktor teknis, kondisi ini dapat pula dipengaruhi oleh dinamika kebijakan pusat, perubahan dalam prioritas program, atau kondisi darurat seperti pandemi yang menyebabkan penyesuaian belanja secara drastis.

Namun, pada tahun 2023, terjadi perbaikan yang signifikan dalam pengelolaan belanja. Rasio varians tercatat sebesar -5%, dengan selisih antara realisasi sebesar Rp816.767.049.389,00 dan anggaran Rp859.920.055.504,80 hanya sebesar Rp43.153.006.116. Meskipun masih menunjukkan under-spending, deviasi ini relatif kecil dibandingkan dua tahun sebelumnya. Capaian ini menunjukkan bahwa perencanaan belanja menjadi lebih realistis dan implementasi anggaran lebih efektif. Kemungkinan besar, ini merupakan hasil dari evaluasi terhadap kelemahan tahun-tahun sebelumnya, perbaikan koordinasi antarsatuan kerja perangkat daerah (SKPD), serta peningkatan kapasitas pelaksanaan program dan pengendalian internal.

Dari tahun ke tahun, varians belanja daerah menunjukkan bahwa realisasi belanja belum sepenuhnya sesuai dengan anggaran yang telah direncanakan. Pada tahun awal penelitian, terdapat selisih yang cukup besar antara target dan realisasi, yang mengindikasikan bahwa banyak program yang belum dapat dilaksanakan sesuai rencana. Penurunan efektivitas ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kendala administrasi dan perubahan kebijakan yang menyebabkan keterlambatan dalam pelaksanaan program. Namun, dalam tahun terakhir penelitian, terjadi perbaikan yang cukup signifikan, menunjukkan bahwa pemerintah mulai lebih efektif dalam menyusun dan mengeksekusi anggaran belanja. Koordinasi yang lebih baik antara pihak terkait serta penyusunan perencanaan yang lebih realistis menjadi faktor utama dalam peningkatan ini.

Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Bone Bolango menyatakan bahwa salah satu penyebab utama selisih antara anggaran dan realisasi belanja adalah kendala teknis di lapangan. Beliau menjelaskan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, terdapat beberapa program yang tertunda akibat proses administrasi yang panjang serta perubahan kebijakan dari pemerintah pusat yang mengharuskan adanya penyesuaian dalam perencanaan belanja daerah. Meskipun terdapat tantangan ini, pemerintah daerah telah berupaya melakukan perbaikan, terutama dalam meningkatkan koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna mempercepat proses pengadaan dan pelaksanaan kegiatan. Kepala Badan Keuangan menekankan bahwa mereka berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap anggaran yang telah disusun benar-benar dapat digunakan secara optimal untuk kepentingan masyarakat tanpa ada keterlambatan.

Menurut Staf Perencanaan dan Penganggaran, selisih antara anggaran dan realisasi belanja ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk efisiensi anggaran dan keterlambatan dalam pelaksanaan program. Beberapa proyek yang direncanakan mengalami penundaan karena kendala teknis, sehingga anggaran yang telah dialokasikan tidak dapat terserap sepenuhnya dalam tahun berjalan. Beliau juga menyebutkan bahwa pada tahun kedua penelitian, situasi lebih sulit karena beberapa program harus disesuaikan dengan kondisi yang berubah. Namun, pada tahun terakhir penelitian, perbaikan mulai terlihat dengan adanya perencanaan yang lebih realistis dan percepatan pencairan dana. Staf perencanaan menegaskan pentingnya melakukan evaluasi lebih mendalam untuk kebutuhan belanja daerah agar anggaran dapat benar-benar direalisasikan secara maksimal dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Dari perspektif audit, auditor internal menilai bahwa ketidaksesuaian antara anggaran dan realisasi belanja masih dalam batas wajar, meskipun terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki. Menurutnya, faktor utama yang menyebabkan anggaran tidak terserap sepenuhnya adalah kurang matangnya perencanaan awal serta adanya faktor eksternal seperti perubahan kebijakan yang menghambat eksekusi program. Auditor juga mengatakan bahwa pada tahun terakhir, terjadi peningkatan dalam disiplin penggunaan anggaran, yang tercermin dari selisih yang semakin kecil antara anggaran dan realisasi belanja. Beliau menekankan bahwa agar efektivitas anggaran tetap terjaga, setiap OPD harus lebih disiplin dalam mengeksekusi anggarannya serta memastikan bahwa

perencanaan keuangan yang dilakukan sudah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan aktual di lapangan.

Hasil analisis rasio varians belanja menunjukkan bahwa pemerintah daerah Bone Bolango masih menghadapi kendala dalam optimalisasi penggunaan anggaran, meskipun terdapat perbaikan dari tahun ke tahun. Selisih antara anggaran dan realisasi belanja cukup besar, namun mulai mengalami perbaikan dengan pendekatan yang lebih baik dalam perencanaan dan koordinasi. Untuk meningkatkan efektivitas anggaran, pemerintah daerah disarankan untuk memperkuat sistem perencanaan belanja yang lebih akurat, mempercepat proses administrasi pencairan dana, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Dengan strategi yang lebih matang dan pengawasan yang lebih ketat, diharapkan realisasi belanja dapat semakin mendekati anggaran yang telah ditetapkan dan memberikan dampak positif yang lebih besar bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Jika dibandingkan dengan teori yang dikemukakan oleh Halim (2016) yang menyatakan bahwa semakin kecil selisih antara anggaran dan realisasi belanja, maka semakin baik efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Rasio varians belanja yang terlalu besar menunjukkan adanya ketidaktepatan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran, yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti perubahan kebijakan, kendala teknis, atau efisiensi anggaran yang tidak optimal. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Putri dan Santoso (2019) tentang efektivitas pengelolaan anggaran belanja daerah di beberapa kabupaten di Indonesia. Dalam penelitian tersebut, ditemukan bahwa sebagian besar daerah

mengalami kesulitan dalam menyerap anggaran secara optimal, terutama karena proses administrasi yang lambat dan perubahan kebijakan yang sering terjadi.

4.3.4 Pembahasan Rasio Efisiensi Belanja Daerah

Rasio efisiensi belanja daerah merupakan alat ukur penting dalam mengevaluasi bagaimana pemerintah daerah mengelola alokasi belanja publik secara optimal. Menurut Mahmudi (2016), rasio ini menggambarkan hubungan antara realisasi belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan dalam dokumen APBD. Tingkat efisiensi dianggap baik apabila realisasi belanja mendekati anggaran, namun tidak melebihi, karena menunjukkan alokasi anggaran yang tepat sasaran dan pelaksanaan program yang disiplin secara fiskal.

Berdasarkan data tiga tahun terakhir, Pemerintah Kabupaten Bone Bolango menunjukkan stabilitas fiskal yang cukup baik dalam hal efisiensi pengeluaran, meskipun terdapat dinamika yang mencerminkan adanya ruang perbaikan struktural. Pada tahun 2021, rasio efisiensi tercatat sebesar 91%, yang tergolong dalam kategori sangat efisien. Hal ini menunjukkan bahwa sekitar 91% dari anggaran belanja yang telah ditetapkan berhasil direalisasikan dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Rasio ini mengindikasikan bahwa pengelolaan belanja daerah sudah dilakukan secara cukup optimal, dengan tingkat pemborosan yang rendah. Namun, efisiensi ini tetap harus dibaca secara kritis selisih 9% dari anggaran menandakan masih adanya program yang tidak terlaksana sepenuhnya, yang bisa berdampak pada capaian output pembangunan jika tidak dikelola dengan strategi pengalihan atau penjadwalan ulang kegiatan yang efisien.

Pada tahun 2022, efisiensi mengalami penurunan menjadi 85%, yang masih berada dalam kategori efisien, tetapi menunjukkan kecenderungan penurunan kapasitas serapan anggaran. Penurunan ini menjadi indikasi bahwa terdapat peningkatan gap antara perencanaan dan implementasi. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti keterlambatan dalam proses administrasi pengadaan, hambatan teknis pada pelaksanaan proyek fisik, atau perubahan kebijakan dalam tahun berjalan yang berdampak pada pelaksanaan belanja. Penurunan efisiensi ini juga dapat menandakan adanya perencanaan anggaran yang belum sepenuhnya realistis, atau lemahnya koordinasi antarsatuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam melaksanakan program kegiatan.

Namun, tahun 2023 menunjukkan perbaikan signifikan, dengan rasio efisiensi mencapai 94%, kembali ke kategori sangat efisien. Kenaikan ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bone Bolango berhasil mengevaluasi dan memperbaiki proses pengelolaan anggaran belanja dari tahun sebelumnya. Realisasi belanja yang mendekati target anggaran menandakan bahwa proses pelaksanaan program dan kegiatan berjalan lebih tertib, akuntabel, dan adaptif terhadap dinamika lapangan. Ini juga bisa mencerminkan peningkatan kapasitas kelembagaan dalam merancang jadwal kegiatan yang realistis, meningkatkan kinerja tim anggaran, serta memperkuat fungsi monitoring dan evaluasi pelaksanaan program.

Dari tahun ke tahun, efisiensi belanja daerah mengalami perubahan yang menunjukkan dinamika dalam pengelolaan keuangan daerah. Penggunaan anggaran masih cukup optimal, dimana sebagian besar dana yang dialokasikan

berhasil dimanfaatkan dengan baik. Namun, pada periode berikutnya, efisiensi belanja mengalami penurunan akibat beberapa kendala dalam pelaksanaan program yang menyebabkan anggaran tidak terserap secara maksimal. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk keterlambatan dalam administrasi, perubahan kebijakan yang menghambat pencairan dana, atau revisi perencanaan proyek yang mengakibatkan penundaan penggunaan anggaran. Pada tahun terakhir peningkatan kembali dalam efisiensi belanja, menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah melakukan perbaikan dalam strategi pengelolaan anggaran. Evaluasi yang lebih cermat dan perencanaan yang lebih matang menjadi faktor utama dalam perbaikan ini, sehingga efisiensi belanja kembali meningkat.

Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Bone Bolango mengakui bahwa penurunan efisiensi belanja pada tahun tertentu disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk perubahan kebijakan dan kendala teknis dalam pelaksanaan anggaran. Beliau menjelaskan bahwa ada beberapa program yang mengalami keterlambatan akibat proses administrasi yang panjang serta perubahan kebijakan dari pemerintah pusat yang mengharuskan adanya revisi dalam perencanaan belanja daerah. Namun, pemerintah daerah telah mengambil langkah-langkah strategis untuk memperbaiki kondisi ini, seperti meningkatkan koordinasi dengan OPD terkait, mempercepat proses pencairan dana, dan memastikan bahwa setiap program dapat berjalan lebih lancar. Beliau menegaskan bahwa komitmen pemerintah daerah adalah terus meningkatkan efisiensi belanja agar setiap anggaran yang dialokasikan dapat digunakan dengan optimal demi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah yang lebih baik.

Menurut Staf Perencanaan dan Penganggaran, penurunan efisiensi belanja dalam satu periode penelitian disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk adanya proyek yang tertunda dan perubahan prioritas belanja yang membuat sebagian anggaran tidak terserap sepenuhnya. Beliau menjelaskan bahwa pengalaman dari tahun sebelumnya digunakan sebagai pelajaran untuk menyusun anggaran yang lebih realistis dan memastikan bahwa setiap program dapat dijalankan sesuai dengan perencanaan awal. Salah satu langkah yang diambil untuk meningkatkan efisiensi belanja adalah dengan lebih sering melakukan evaluasi terhadap program yang berjalan serta menyesuaikan anggaran dengan kondisi faktual di lapangan. Selain itu, percepatan dalam pencairan dana menjadi fokus utama agar program-program yang telah direncanakan dapat berjalan tepat waktu dan manfaatnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat.

Dari perspektif audit, auditor internal menilai bahwa fluktuasi dalam efisiensi belanja daerah masih dalam batas wajar, namun tetap perlu ada upaya peningkatan dalam sistem pengelolaan anggaran. Beliau menjelaskan bahwa efisiensi belanja yang menurun pada periode tertentu mencerminkan adanya kelemahan dalam sistem perencanaan dan eksekusi anggaran yang perlu segera diperbaiki. Selain itu, faktor eksternal seperti regulasi baru dari pemerintah pusat juga turut berkontribusi dalam keterlambatan pencairan dana dan pelaksanaan program. Auditor menekankan bahwa perbaikan dalam efisiensi belanja dapat dilakukan dengan meningkatkan transparansi dalam perencanaan anggaran, disiplin dalam pelaksanaan program, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Beliau juga menambahkan bahwa evaluasi yang lebih ketat

dan perencanaan yang lebih akurat akan menjadi faktor utama dalam menjaga stabilitas efisiensi belanja daerah.

Hasil analisis rasio efisiensi belanja menunjukkan bahwa meskipun terdapat penurunan efisiensi dalam satu periode, tren keseluruhan menunjukkan adanya upaya peningkatan dalam pengelolaan anggaran daerah. Pemerintah daerah Bone Bolango telah menunjukkan komitmen dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja dengan melakukan evaluasi rutin serta mempercepat proses administrasi dan pencairan dana. Untuk menjaga kestabilan efisiensi anggaran ke depannya, pemerintah daerah bisa memperkuat sistem perencanaan keuangan yang lebih akurat, meningkatkan koordinasi antar OPD, serta menerapkan sistem monitoring dan evaluasi yang lebih ketat dalam pelaksanaan program. Selain itu, digitalisasi dalam pengelolaan anggaran juga dapat menjadi solusi untuk mempercepat pencairan dana dan mengurangi risiko keterlambatan dalam pelaksanaan program.

Hasil penelitian ini sejalan dengan konsep efisiensi belanja daerah yang dikemukakan oleh Mahmudi (2016), efisiensi dalam pengelolaan anggaran daerah dapat dilihat dari seberapa besar anggaran yang direalisasikan dibandingkan dengan anggaran yang direncanakan. Jika realisasi anggaran mendekati angka yang telah ditetapkan atau bahkan melebihi target dengan output yang optimal, maka dapat dikatakan bahwa daerah tersebut telah mencapai efisiensi dalam belanjanya. Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu, hasil penelitian ini memiliki kemiripan dengan studi yang dilakukan oleh Rahmawati dan Sugiarto (2020) tentang efisiensi pengelolaan belanja daerah di beberapa provinsi di

Indonesia. Hasil penelitian ditemukan bahwa efisiensi belanja daerah mengalami fluktuasi akibat faktor administratif dan kebijakan yang berubah-ubah. Beberapa daerah yang mereka teliti mengalami penurunan efisiensi dalam periode tertentu, namun mampu meningkat kembali setelah melakukan evaluasi dan perbaikan dalam sistem pengelolaan anggaran.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka yang menjadi kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

1. Rasio Varians Pendapatan menunjukkan bahwa realisasi pendapatan daerah mengalami fluktuasi dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2021, varians pendapatan sebesar -5%, menandakan bahwa realisasi masih di bawah target. Tahun 2022, selisih semakin kecil dengan varians -0,03%, menunjukkan perbaikan dalam perencanaan. Tahun 2023 mencatat varians 1,27%, yang berarti realisasi pendapatan lebih tinggi dari target. Tren ini menunjukkan bahwa strategi pengelolaan pendapatan daerah semakin baik dan mendekati target yang telah ditetapkan.
2. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, efektivitas PAD hanya mencapai 80%, yang tergolong kurang efektif. Tahun 2022 meningkat menjadi 93%, masuk dalam kategori cukup efektif. Pada tahun 2023, efektivitas PAD mencapai 103%, yang berarti realisasi pendapatan telah melampaui target. Perbaikan ini menunjukkan bahwa strategi optimalisasi sumber pendapatan dan kepatuhan wajib pajak semakin baik, sehingga PAD bisa dikelola lebih efektif.
3. Rasio Varians Belanja menunjukkan bahwa realisasi belanja daerah masih lebih rendah dibandingkan dengan anggaran yang ditetapkan. Pada tahun

2021, selisih antara anggaran dan realisasi belanja mencapai -8%, meningkat menjadi -14% pada tahun 2022, yang menandakan bahwa anggaran tidak terserap secara maksimal. Namun, pada tahun 2023, varians belanja menurun menjadi -5%, yang berarti ada peningkatan dalam efektivitas penyerapan anggaran. Pemerintah mulai melakukan perbaikan strategi agar anggaran dapat terserap lebih optimal.

4. Rasio Efisiensi Belanja mengalami fluktuasi selama tiga tahun terakhir, namun tetap dalam kategori efisien. Pada tahun 2021, efisiensi belanja mencapai 91%, menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran terserap dengan baik. Tahun 2022 mengalami sedikit penurunan menjadi 85%, yang mengindikasikan adanya kendala dalam realisasi anggaran. Pada tahun 2023, efisiensi meningkat kembali menjadi 94%, yang berarti pemerintah daerah semakin optimal dalam menggunakan anggaran. Tren ini menunjukkan adanya peningkatan disiplin dalam eksekusi anggaran.

5.2 Saran

Berikut saran untuk pengembangan penelitian ini:

1. Untuk Lokasi Penelitian

Pemerintah daerah Bone Bolango perlu meningkatkan akurasi perencanaan anggaran agar varians pendapatan dan belanja semakin kecil. Selain itu, sistem administrasi dan pencairan dana harus diperbaiki agar efisiensi belanja tetap optimal. Optimalisasi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga harus diperkuat dengan kebijakan inovatif, peningkatan kepatuhan

pajak, serta diversifikasi sumber pendapatan guna mengurangi ketergantungan terhadap transfer dana pusat.

2. Untuk Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambahkan faktor eksternal seperti kondisi ekonomi dan kebijakan fiskal dalam menganalisis pendapatan dan belanja daerah. Selain itu, penelitian bisa diperluas dengan membandingkan kinerja keuangan Bone Bolango dengan daerah lain yang memiliki karakteristik serupa. Metode kualitatif yang lebih mendalam, seperti wawancara dengan lebih banyak pemangku kepentingan, dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terkait efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, A. (2016). *Partisipasi Masyarakat dalam Penganggaran Partisipatif*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Badrudin, R. (2017). *Akuntansi Sektor Publik: Pendekatan Teori dan Praktik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Bastian, I. (2015). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Charles, L. (2019). *Teori dan Praktik Anggaran Publik*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Firdausy, C. M. (2017). *Desentralisasi Fiskal dan Kemandirian Daerah: Analisis Ekonomi Regional*. Jakarta: LP3ES.
- Halim, A. (2008). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A. (2011). *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A. (2016). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mahmudi. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2012). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Pemerintahan*. Yogyakarta: Andi.
- Moleong, L. J. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muindro Renyowijoyo. (2012). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Muindro Renyowijoyo. (2013). *Penganggaran di Sektor Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Riyanto, B. (2017). *Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan*. Yogyakarta: BPFE.
- Siahaan, E. (2005). *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

DOKUMENTASI



Kepala Badan Keuangan Pendapatan Daerah Bone Bolango



Staf Perencanaan dan Penganggaran Badan Keuangan Pendapatan Daerah Bone
Bolango



Auditor Internal Badan Keuangan Pendapatan Daerah Bone Bolango

DAFTAR PERTANYAAN

A. Pertanyaan untuk Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah:

1. Bagaimana akurasi perencanaan pendapatan daerah Kabupaten Bone Bolango dalam tiga tahun terakhir, khususnya terkait selisih antara anggaran dan realisasi pendapatan, dan apa strategi yang dilakukan untuk menjaga agar perencanaan pendapatan tetap realistis dan stabil dari tahun ke tahun?
2. Bagaimana menilai strategi dan langkah-langkah yang telah dilakukan dalam meningkatkan efektivitas penerimaan PAD Kabupaten Bone Bolango selama tiga tahun terakhir, termasuk peran pengawasan, koordinasi dengan OPD, serta upaya optimalisasi potensi PAD dan peningkatan pelayanan kepada wajib pajak?
3. Bagaimana menilai tantangan dan penyebab utama perbedaan antara anggaran dan realisasi belanja daerah selama tiga tahun terakhir, serta apa langkah perbaikan yang telah dan akan dilakukan, khususnya dalam hal percepatan proses administrasi, antisipasi terhadap perubahan kebijakan pusat, dan peningkatan koordinasi antar OPD untuk mendukung penyerapan anggaran yang lebih optimal?
4. Bagaimana menjelaskan dinamika efisiensi belanja daerah dalam tiga tahun terakhir, khususnya penurunan efisiensi pada tahun 2022 dan upaya-upaya perbaikan yang dilakukan di tahun 2023 seperti percepatan pencairan dana dan peningkatan koordinasi antar OPD, serta bagaimana komitmen pemerintah dalam memastikan penggunaan anggaran yang optimal dan bermanfaat bagi masyarakat?

B. Pertanyaan untuk Staf Perencanaan dan Penganggaran BKPD:

1. Bagaimana proses penyusunan target pendapatan daerah dilakukan agar sesuai dengan kondisi aktual daerah, termasuk bagaimana penyesuaian target dilakukan setiap tahun, serta bagaimana melihat capaian pendapatan

tahun 2021–2023 dalam konteks selisih realisasi dengan anggaran dan peran faktor eksternal terhadap pencapaian tersebut?

2. Bagaimana evaluasi dan strategi perencanaan anggaran PAD dilakukan agar lebih efektif dari tahun ke tahun, khususnya dalam menyusun target yang realistis, menyesuaikan kebijakan dengan kondisi ekonomi, serta memanfaatkan data yang lebih akurat dalam proses perencanaan?
3. Apa saja faktor yang menyebabkan selisih antara anggaran dan realisasi belanja daerah, termasuk peran efisiensi, kendala teknis, serta bagaimana strategi yang diterapkan dalam menyusun anggaran yang lebih realistis dan mempercepat proses pencairan dana agar program dapat terlaksana tepat waktu dan manfaatnya lebih cepat dirasakan oleh masyarakat?
4. Apa saja penyebab tidak optimalnya serapan anggaran pada tahun 2022, dan bagaimana langkah-langkah yang dilakukan dalam penyusunan anggaran tahun 2023 agar lebih efisien, seperti pengetatan perencanaan, peningkatan evaluasi, serta pengendalian agar tidak ada dana yang tidak terserap atau terbuang percuma?

C. Pertanyaan untuk Auditor Internal BKPD:

1. Dari perspektif audit internal, bagaimana cara menilai tingkat akurasi dan kewajaran perencanaan serta realisasi pendapatan daerah Kabupaten Bone Bolango selama tiga tahun terakhir, khususnya terkait varians anggaran pendapatan, dan bagaimana melihat efektivitas strategi penerimaan pendapatan yang dilakukan, termasuk dalam mendorong kemandirian fiskal melalui optimalisasi PAD? Dan bagaimana peran audit internal dalam menjaga konsistensi antara anggaran dan realisasi agar tetap dalam batas varians yang wajar?
2. Bagaimana menilai tren peningkatan efektivitas PAD dalam tiga tahun terakhir, serta apa rekomendasi untuk menjaga konsistensi keberhasilan ini ke depan, termasuk dalam hal transparansi, pengawasan, dan inovasi dalam pengelolaan sumber-sumber PAD?

3. Bagaimana melihat penyebab rendahnya serapan anggaran belanja di Kabupaten Bone Bolango selama tiga tahun terakhir, dan apa evaluasi serta rekomendasi terkait dengan perencanaan yang cermat dan kedisiplinan OPD dalam pelaksanaan anggaran agar tidak terjadi dana tersisa atau program yang tertunda?
4. Bagaimana menilai penyebab turunnya efisiensi belanja pada tahun 2022 serta perbaikan yang mulai terlihat di tahun 2023, dan apa rekomendasi agar efisiensi belanja dapat terus ditingkatkan, khususnya dalam hal transparansi pengelolaan anggaran, kedisiplinan eksekusi program oleh OPD, dan perencanaan anggaran yang lebih matang?

D. Pertanyaan untuk masyarakat

1. Apakah program-program atau kegiatan pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah daerah biasanya bisa dilaksanakan sesuai dengan janji atau rencana awal yang disampaikan ke masyarakat?
2. Apakah pemerintah daerah sudah memanfaatkan potensi sumber pendapatan dari masyarakat atau lingkungan sekitar secara maksimal dan adil, misalnya dari pajak, retribusi, atau usaha lokal?
3. Apakah anggaran yang direncanakan untuk pembangunan dan layanan publik seringkali tidak terealisasi atau hanya sebagian saja yang benar-benar dilaksanakan?
4. Apakah penggunaan anggaran pemerintah daerah sudah terasa manfaatnya dan tidak terkesan pemborosan atau sia-sia?



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2021 DAN 2020

| NO. URUT | URAIAN | ANGGARAN 2021 | REALISASI 2021 | (%) | REALISASI 2020 |
|----------|---|----------------------|----------------------|--------|--------------------|
| 4 | PENDAPATAN DAERAH | 1.063.533.981.670,00 | 1.011.278.890.342,79 | 95,09 | 962.485.223.766,60 |
| 4.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 113.087.605.912,00 | 90.519.203.018,79 | 80,04 | 75.145.390.393,60 |
| 4.1.1 | Pajak Daerah | 20.821.500.000,00 | 11.597.741.303,51 | 55,70 | 9.742.167.901,00 |
| 4.1.2 | Retribusi Daerah | 18.669.294.862,00 | 11.375.765.054,00 | 60,93 | 4.843.324.437,00 |
| 4.1.3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 2.000.000.000,00 | 1.995.478.140,00 | 99,77 | 1.194.084.374,00 |
| 4.1.4 | Lain-lain PAD yang Sah | 71.596.811.050,00 | 65.550.218.521,28 | 91,55 | 59.365.813.681,60 |
| 4.2 | PENDAPATAN TRANSFER | 900.168.648.551,00 | 889.339.280.129,00 | 98,80 | 851.547.950.341,00 |
| 4.2.1 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 883.307.663.842,00 | 863.763.958.297,00 | 97,79 | 821.327.538.054,00 |
| 4.2.1.1 | Dana Perimbangan | 686.944.350.842,00 | 667.400.645.297,00 | 97,15 | 627.022.366.054,00 |
| 4.2.1.2 | Dana Insentif Daerah (DID) | 54.186.573.000,00 | 54.186.573.000,00 | 100,00 | 52.128.432.000,00 |
| 4.2.1.5 | Dana Desa | 142.176.740.000,00 | 142.176.740.000,00 | 100,00 | 142.176.740.000,00 |
| 4.2.2 | Pendapatan Transfer Antar Daerah | 16.860.984.709,00 | 25.575.321.832,00 | 151,68 | 30.220.412.287,00 |
| 4.2.2.1 | Pendapatan Bagi Hasil | 16.860.984.709,00 | 25.575.321.832,00 | 151,68 | 27.740.029.837,00 |
| 4.2.2.2 | Bantuan Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.480.382.450,00 |
| 4.3 | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 50.277.727.207,00 | 31.420.407.195,00 | 62,49 | 35.791.883.032,00 |
| 4.3.1 | Pendapatan Hibah | 28.439.311.686,00 | 9.596.714.495,00 | 33,74 | 35.791.883.032,00 |
| 4.3.3 | Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 21.838.415.521,00 | 21.823.692.700,00 | 99,93 | 0,00 |
| 5 | BELANJA DAERAH | 1.062.878.884.547,48 | 970.627.002.491,02 | 91,32 | 955.340.258.355,20 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | 688.812.517.315,48 | 630.688.841.640,02 | 91,56 | 626.348.348.269,20 |
| 5.1.1 | Belanja Pegawai | 364.799.597.321,59 | 357.255.703.214,00 | 97,93 | 385.920.543.651,00 |
| 5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 302.265.235.366,89 | 260.403.044.162,02 | 86,15 | 179.517.432.294,20 |
| 5.1.3 | Belanja Bunga | 20.000.000,00 | 18.276.017,00 | 91,38 | 0,00 |
| 5.1.4 | Belanja Subsidi | 215.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.5 | Belanja Hibah | 20.152.665.337,00 | 12.033.787.097,00 | 59,71 | 56.389.533.474,00 |
| 5.1.6 | Belanja Bantuan Sosial | 1.360.019.290,00 | 978.031.150,00 | 71,91 | 4.520.838.850,00 |
| 5.2 | BELANJA MODAL | 179.832.622.647,00 | 146.069.054.399,00 | 81,23 | 122.580.241.905,00 |
| 5.2.1 | Belanja Modal Tanah | 5.348.225.475,00 | 5.220.415.872,00 | 97,61 | 2.054.422.440,00 |
| 5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 46.474.432.042,00 | 42.328.801.302,00 | 91,08 | 60.132.179.574,00 |
| 5.2.3 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 93.061.376.081,00 | 69.363.453.479,00 | 74,54 | 39.426.062.158,00 |
| 5.2.4 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 32.931.334.992,00 | 27.307.366.863,00 | 82,92 | 18.335.725.073,00 |
| 5.2.5 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 2.017.254.057,00 | 1.849.016.883,00 | 91,66 | 2.631.852.660,00 |

| NO. URUT | URAIAN | ANGGARAN 2021 | REALISASI 2021 | (%) | REALISASI 2020 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|----------|--------------------|
| 5 . 3 | BELANJA TIDAK TERDUGA | 350.219.169,00 | 110.850.150,00 | 31,65 | 13.692.954.257,00 |
| 5 . 3 . 1 | Belanja Tidak Terduga | 350.219.169,00 | 110.850.150,00 | 31,65 | 13.692.954.257,00 |
| 5 . 4 | BELANJA TRANSFER | 193.883.525.416,00 | 193.758.256.302,00 | 99,94 | 192.718.713.924,00 |
| 5 . 4 . 1 | Belanja Bagi Hasil | 869.000.000,00 | 856.045.863,00 | 98,51 | 50.541.973.924,00 |
| 5 . 4 . 2 | Belanja Bantuan Keuangan | 193.014.525.416,00 | 192.902.210.439,00 | 99,94 | 142.176.740.000,00 |
| | SURPLUS / (DEFISIT) | 655.097.122,52 | 40.651.887.851,77 | 6.205,47 | 7.144.965.411,40 |
| 6 | PEMBIAYAAN DAERAH | | | | |
| 6 . 1 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 20.594.902.877,48 | 11.351.474.248,88 | 55,12 | 13.712.969.536,08 |
| 6 . 1 . 1 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 10.594.902.877,48 | 10.607.202.048,88 | 100,12 | 7.500.834.466,08 |
| 6 . 1 . 4 | Penerimaan Pinjaman Daerah | 10.000.000.000,00 | 744.272.200,00 | 7,44 | 6.212.135.070,00 |
| 6 . 2 | PENGELUARAN PEMBIAYAAN | 21.250.000.000,00 | 7.054.272.200,00 | 33,20 | 10.263.032.070,00 |
| 6 . 2 . 2 | Penyertaan Modal Daerah | 11.250.000.000,00 | 6.310.000.000,00 | 56,09 | 4.050.897.000,00 |
| 6 . 2 . 3 | Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo | 10.000.000.000,00 | 744.272.200,00 | 7,44 | 6.212.135.070,00 |
| | PEMBIAYAAN NETTO | (655.097.122,52) | 4.297.202.048,88 | (655,96) | 3.449.937.466,08 |
| | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) | 0,00 | 44.949.089.900,65 | 0,00 | 10.594.902.877,48 |

Suwawa, 1 Januari 2021
BUPATI BONE BOLANGO

HAMIM POU



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021

| KODE REKENING | URAIAN | ANGGARAN | REALISASI 2022 | (%) | REALISASI 2021 |
|---------------|--|--------------------|--------------------|--------|----------------------|
| 4 | PENDAPATAN | 915.341.845.318,50 | 886.289.616.614,22 | 96,83 | 1.011.278.890.342,79 |
| 4.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 97.762.449.209,50 | 90.932.057.807,22 | 93,01 | 90.519.203.018,79 |
| 4.1.01 | Pendapatan Pajak Daerah | 17.455.505.300,00 | 14.949.423.642,00 | 85,64 | 11.597.741.303,51 |
| 4.1.02 | Pendapatan Retribusi Daerah | 12.929.531.800,00 | 8.139.719.923,00 | 62,95 | 11.375.765.054,00 |
| 4.1.03 | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 2.000.000.000,00 | 1.422.015.460,00 | 71,10 | 1.995.478.140,00 |
| 4.1.04 | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 65.377.412.109,50 | 66.420.898.782,22 | 101,60 | 65.550.218.521,28 |
| 4.2 | PENDAPATAN TRANSFER | 772.832.065.133,00 | 760.778.508.094,00 | 98,44 | 889.339.280.129,00 |
| 4.2.01 | TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN | 603.393.993.000,00 | 588.586.497.881,00 | 97,55 | 667.400.645.297,00 |
| 4.2.01.01 | Dana Bagi Hasil | 10.072.950.000,00 | 12.414.551.786,00 | 123,25 | 12.571.174.402,00 |
| 4.2.01.02 | Dana Alokasi Umum | 452.419.931.000,00 | 452.120.923.551,00 | 99,93 | 452.140.544.000,00 |
| 4.2.01.03 | Dana Alokasi Khusus | 140.901.112.000,00 | 124.051.022.544,00 | 88,04 | 202.688.926.895,00 |
| 4.2.02 | TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA | 147.574.309.000,00 | 147.574.309.000,00 | 100,00 | 196.363.313.000,00 |
| 4.2.02.01 | Dana Insentif Daerah (DID) | 21.998.435.000,00 | 21.998.435.000,00 | 100,00 | 54.186.573.000,00 |
| 4.2.02.04 | Dana Desa | 125.575.874.000,00 | 125.575.874.000,00 | 100,00 | 142.176.740.000,00 |
| 4.2.03 | TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI | 21.863.763.133,00 | 24.617.701.213,00 | 112,60 | 25.575.321.832,00 |
| 4.2.03.01 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak | 21.863.763.133,00 | 24.617.701.213,00 | 112,60 | 25.575.321.832,00 |
| 4.3 | LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH | 44.747.330.976,00 | 34.579.050.713,00 | 77,28 | 31.420.407.195,00 |
| 4.3.01 | Pendapatan Hibah | 13.414.846.500,00 | 6.794.859.799,00 | 50,65 | 9.596.714.495,00 |
| 4.3.03 | Pendapatan Lainnya | 31.332.484.476,00 | 27.784.190.914,00 | 88,68 | 21.823.692.700,00 |
| 5 | BELANJA | 910.632.173.316,88 | 776.963.401.190,40 | 85,32 | 776.868.746.189,02 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | 659.018.227.506,82 | 630.533.802.794,40 | 95,68 | 630.688.841.640,02 |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 374.742.022.070,52 | 366.262.133.721,00 | 97,74 | 357.255.703.214,00 |
| 5.1.02 | Belanja Barang | 263.388.339.989,30 | 250.098.311.227,40 | 94,95 | 260.403.044.162,02 |
| 5.1.03 | Belanja Bunga | 1.887.963.750,00 | 676.016.250,00 | 35,81 | 18.276.017,00 |
| 5.1.05 | Belanja Hibah | 17.794.901.697,00 | 12.301.887.797,00 | 69,13 | 12.033.787.097,00 |
| 5.1.06 | Belanja Bantuan Sosial | 1.205.000.000,00 | 1.195.453.799,00 | 99,21 | 978.031.150,00 |
| 5.2 | BELANJA MODAL | 251.014.743.810,06 | 146.063.835.448,00 | 58,19 | 146.069.054.399,00 |
| 5.2.01 | Belanja Tanah | 3.659.000.000,00 | 3.248.632.040,00 | 88,78 | 5.220.415.872,00 |
| 5.2.02 | Belanja Peralatan dan Mesin | 55.687.438.118,64 | 53.202.150.293,00 | 95,54 | 42.328.801.302,00 |
| 5.2.03 | Belanja Bangunan dan Gedung | 114.127.828.814,33 | 51.598.534.906,00 | 45,21 | 69.363.453.479,00 |
| 5.2.04 | Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan | 74.103.020.382,09 | 35.013.558.709,00 | 47,25 | 27.307.366.863,00 |
| 5.2.05 | Belanja Aset Tetap Lainnya | 3.312.918.313,00 | 2.886.660.500,00 | 87,13 | 1.799.116.883,00 |
| 5.2.06 | Belanja Aset Lainnya | 124.538.182,00 | 114.299.000,00 | 91,78 | 49.900.000,00 |
| 5.3 | BELANJA TAK TERDUGA | 599.202.000,00 | 365.762.948,00 | 61,04 | 110.850.150,00 |



| KODE REKENING | URAIAN | ANGGARAN | REALISASI 2022 | (%) | REALISASI 2021 |
|---------------|--|----------------------|---------------------|--------|--------------------|
| 5.3.01 | Belanja Tak Terduga | 599.202.000,00 | 365.762.948,00 | 61,04 | 110.850.150,00 |
| 6 | TRANSFER | 172.891.846.600,00 | 172.891.846.600,00 | 100,00 | 193.758.256.302,00 |
| 6.1 | TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA | 172.891.846.600,00 | 172.891.846.600,00 | 100,00 | 193.758.256.302,00 |
| 6.1.01 | Bagi Hasil Pajak | 695.000.000,00 | 695.000.000,00 | 100,00 | 683.496.059,00 |
| 6.1.02 | Bagi Hasil Retribusi | 174.000.000,00 | 174.000.000,00 | 100,00 | 172.549.804,00 |
| 6.1.03 | Bagi Hasil Pendapatan Lainnya | 172.022.846.600,00 | 172.022.846.600,00 | 100,00 | 192.902.210.439,00 |
| | SURPLUS / DEFISIT | (168.182.174.598,38) | (63.565.631.176,18) | 0 | 40.651.887.851,77 |
| 7.1 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 170.072.174.598,38 | 169.150.856.352,65 | 99,46 | 11.351.474.248,88 |
| 7.1.01 | Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) | 35.072.174.598,38 | 44.955.247.977,65 | 128,18 | 10.607.202.048,88 |
| 7.1.04 | Penerimaan Pinjaman Daerah | 135.000.000.000,00 | 123.195.608.375,00 | 91,26 | 744.272.200,00 |
| 7.1.05 | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah | 0,00 | 1.000.000.000,00 | 0 | 0,00 |
| 7.2 | PENGELUARAN PEMBIAYAAN | 1.890.000.000,00 | 1.300.000.000,00 | 68,78 | 7.054.272.200,00 |
| 7.2.02 | Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah | 1.890.000.000,00 | 1.300.000.000,00 | 68,78 | 6.310.000.000,00 |
| 7.2.03 | Pembayaran Pokok Utang | 0,00 | 0,00 | 0 | 744.272.200,00 |
| | PEMBIAYAAN NETTO | 168.182.174.598,38 | 167.850.856.352,65 | 99,80 | 4.297.202.048,88 |
| | SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN | 0,00 | 104.285.225.176,47 | 0 | 44.949.089.900,65 |





PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

| KODE REKENING | URAIAN | ANGGARAN | REALISASI 2023 | (%) | REALISASI 2022 |
|---------------|--|--------------------|--------------------|--------|--------------------|
| 4 | PENDAPATAN | 930.076.588.224,33 | 941.908.522.583,71 | 101,27 | 886.289.616.614,22 |
| 4.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 122.013.577.680,05 | 126.171.505.828,71 | 103,41 | 90.932.057.807,22 |
| 4.1.01 | Pendapatan Pajak Daerah | 20.107.000.000,00 | 17.403.257.309,00 | 86,55 | 14.949.423.642,00 |
| 4.1.02 | Pendapatan Retribusi Daerah | 16.834.617.346,80 | 10.345.769.007,00 | 61,46 | 8.139.719.923,00 |
| 4.1.03 | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 2.250.000.000,00 | 2.298.147.713,00 | 102,14 | 1.422.015.460,00 |
| 4.1.04 | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 82.821.960.333,25 | 96.124.331.799,71 | 116,06 | 66.420.898.782,22 |
| 4.2 | PENDAPATAN TRANSFER | 787.688.432.296,28 | 800.603.594.010,00 | 101,64 | 760.778.508.094,00 |
| 4.2.01 | TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN | 641.241.746.226,20 | 640.025.026.204,00 | 99,81 | 588.586.497.881,00 |
| 4.2.01.01 | Dana Bagi Hasil | 6.968.610.000,00 | 8.162.488.841,00 | 117,13 | 12.414.551.786,00 |
| 4.2.01.02 | Dana Alokasi Umum | 468.391.136.000,00 | 471.845.465.028,00 | 100,74 | 452.120.923.551,00 |
| 4.2.01.03 | Dana Alokasi Khusus | 165.882.000.226,20 | 160.017.072.335,00 | 96,46 | 124.051.022.544,00 |
| 4.2.02 | TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA | 118.122.588.000,00 | 134.893.132.000,00 | 114,20 | 147.574.309.000,00 |
| 4.2.02.01 | Dana Insentif Daerah (DID) | 0,00 | 12.267.000.000,00 | 0 | 21.998.435.000,00 |
| 4.2.02.04 | Dana Desa | 118.122.588.000,00 | 122.626.132.000,00 | 103,81 | 125.575.874.000,00 |
| 4.2.03 | TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI | 28.324.098.070,08 | 25.685.435.806,00 | 90,68 | 24.617.701.213,00 |
| 4.2.03.01 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak | 28.049.098.070,08 | 25.410.435.806,00 | 90,59 | 24.617.701.213,00 |
| 4.2.03.02 | Pendapatan Bagi Hasil Lainnya | 275.000.000,00 | 275.000.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 4.3 | LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH | 20.374.578.248,00 | 15.133.422.745,00 | 74,28 | 34.579.050.713,00 |
| 4.3.01 | Pendapatan Hibah | 10.079.508.500,00 | 6.585.069.099,00 | 65,33 | 6.794.859.799,00 |
| 4.3.03 | Pendapatan Lainnya | 10.295.069.748,00 | 8.548.353.646,00 | 83,03 | 27.784.190.914,00 |
| 5 | BELANJA | 859.920.055.504,80 | 816.767.049.389,00 | 94,98 | 776.963.401.190,40 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | 684.047.602.187,62 | 655.023.718.006,00 | 95,76 | 630.533.802.794,40 |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 373.981.583.920,23 | 366.653.429.323,00 | 98,04 | 366.262.133.721,00 |
| 5.1.02 | Belanja Barang | 279.271.476.049,05 | 268.772.996.327,00 | 96,24 | 250.098.311.227,40 |
| 5.1.03 | Belanja Bunga | 6.931.955.521,34 | 6.634.573.778,00 | 95,71 | 676.016.250,00 |
| 5.1.05 | Belanja Hibah | 23.248.586.697,00 | 12.359.392.422,00 | 53,16 | 12.301.887.797,00 |
| 5.1.06 | Belanja Bantuan Sosial | 614.000.000,00 | 603.326.156,00 | 98,26 | 1.195.453.799,00 |
| 5.2 | BELANJA MODAL | 174.478.058.795,18 | 161.226.679.793,00 | 92,41 | 146.063.835.448,00 |
| 5.2.01 | Belanja Tanah | 997.000.000,00 | 970.000.000,00 | 97,29 | 3.248.632.040,00 |
| 5.2.02 | Belanja Peralatan dan Mesin | 18.548.184.300,94 | 17.493.340.458,00 | 94,31 | 53.202.150.293,00 |
| 5.2.03 | Belanja Bangunan dan Gedung | 70.392.384.705,54 | 67.394.571.362,00 | 95,74 | 51.598.534.906,00 |
| 5.2.04 | Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan | 82.584.182.198,70 | 73.511.417.947,00 | 89,01 | 35.013.558.709,00 |
| 5.2.05 | Belanja Aset Tetap Lainnya | 1.939.570.090,00 | 1.857.350.026,00 | 95,76 | 3.000.959.500,00 |
| 5.2.06 | Belanja Aset Lainnya | 16.737.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| KODE REKENING | URAIAN | ANGGARAN | REALISASI 2023 | (%) | REALISASI 2022 |
|---------------|--|---------------------|---------------------|--------|---------------------|
| 5.3 | BELANJA TAK TERDUGA | 1.394.394.522,00 | 516.651.590,00 | 37,05 | 365.762.948,00 |
| 5.3.01 | Belanja Tak Terduga | 1.394.394.522,00 | 516.651.590,00 | 37,05 | 365.762.948,00 |
| 6 | TRANSFER | 166.958.562.600,00 | 170.937.692.500,00 | 102,38 | 172.891.846.600,00 |
| 6.1 | TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA | 166.958.562.600,00 | 170.937.692.500,00 | 102,38 | 172.891.846.600,00 |
| 6.1.01 | Bagi Hasil Pajak | 1.126.000.000,00 | 675.600.000,00 | 60,00 | 695.000.000,00 |
| 6.1.02 | Bagi Hasil Retribusi | 174.000.000,00 | 104.400.000,00 | 60,00 | 174.000.000,00 |
| 6.1.03 | Bagi Hasil Pendapatan Lainnya | 165.658.562.600,00 | 170.157.692.500,00 | 102,72 | 172.022.846.600,00 |
| | SURPLUS / DEFISIT | (96.802.029.880,47) | (45.796.219.305,29) | 0 | (63.565.631.176,18) |
| 7.1 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 98.052.029.880,47 | 104.285.365.642,47 | 106,36 | 169.150.856.352,65 |
| 7.1.01 | Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) | 98.052.029.880,47 | 104.285.365.642,47 | 106,36 | 44.955.247.977,65 |
| 7.1.04 | Penerimaan Pinjaman Daerah | 0,00 | 0,00 | 0 | 123.195.608.375,00 |
| 7.1.05 | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah | 0,00 | 0,00 | 0 | 1.000.000.000,00 |
| 7.2 | PENGELUARAN PEMBIAYAAN | 1.250.000.000,00 | 1.250.000.000,00 | 100,00 | 1.300.000.000,00 |
| 7.2.02 | Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah | 1.250.000.000,00 | 1.250.000.000,00 | 100,00 | 1.300.000.000,00 |
| | PEMBIAYAAN NETTO | 96.802.029.880,47 | 103.035.365.642,47 | 106,44 | 167.850.856.352,65 |
| | SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN | (0,00) | 57.239.146.337,18 | 0 | 104.285.225.176,47 |





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN

Jl. Achmad Nadjamuddin No.17, Kampus Unisan Gorontalo Lt.1 Kota Gorontalo 96128
Website: lemlitunisan.ac.id, Email: lembagapenelitian@unisan.ac.id

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : 408/PIP/B.04/LP-UIG/2025

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dr. Rahmisyari, ST., SE., MM
NIDN : 0929117202
Pangkat Akademik : Lektor Kepala
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian Universitas Ichsan Gorontalo

Menerangkan bahwa:

Nama : ANGGI MUSTAPA
NIM : E1121018
Fakultas : Ekonomi
Program Studi : Akuntansi
Judul Penelitian : ANALISIS PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PEMERINTAH PADA BADAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN
BONE BOLANGO

Adalah benar telah melaksanakan penelitian dalam rangka untuk memenuhi tugas akhir/skripsi di **BANDAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO** terhitung pada tanggal 10 Maret 2025.

Dikeluarkan di Gorontalo

Tanggal, 11/03/2025

Ketua Lembaga Penelitian

Dr. Rahmisyari, ST., SE., MM

NIDN: 0929117202



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

BADAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN BONE BOLANGO

Jl. Prof. DR. B.J. Habibie No.2 Kec. Suwawa Telp. (0435) 8591472 Kode Pos 96184

SURAT KETERANGAN

Nomor : 408/PIP/B.04/LP-BKPD/2025

Bersama Surat ini kami sampaikan Perihal Pelaksanaan Penelitian Mahasiswa Dengan Data Sebagai berikut :

| | |
|------------------|--------------------------------|
| Nama Mahasiswa | : Anggi Mustapa |
| NIM | : E1121018 |
| Fakultas | : Ekonomi |
| Jurusan | : Akuntansi |
| Perguruan Tinggi | : Universitas Ichsan Gorontalo |

Sesuai dengan data di atas, kami sampaikan bahwa mahasiswa Telah melakukan penelitian pada 10 Januari 2025 bertempat di Badan Keuangan Dan Pendapatan Bone Bolango (BKPD), dalam rangka penyusunan proposal/skripsi untuk syarat kelulusan dengan judul "Analisis Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Pada Badan Keuangan Dan pendapatan Daerah".

Demikian yang dapat kami sampaikan agar bisa digunakan sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerja sama diucapkan terima kasih.


Gorontalo,

Kasubag umum dan kepegawaian


Konstansion Trillun, S.STP

Fekon02 Unisan

Anggi Mustafa_ANALISIS PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PEMERINTAH PADA BADAN KEUANGAN DAN PENDA...

 AKUNTANSI_02
 Fak. Ekonomi
 LL Dikti IX Turnitin Consortium

Document Details

Submission ID

trn:oid::1:3213739590

84 Pages

Submission Date

Apr 12, 2025, 11:54 AM GMT+7

13,981 Words

Download Date

Apr 12, 2025, 12:00 PM GMT+7

95,187 Characters

File Name

Turnitin_ANGGI.docx

File Size

1.2 MB



19% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text

Top Sources

- 20%  Internet sources
- 12%  Publications
- 12%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
FAKULTAS EKONOMI

SK. MENDIKNÁS NOMOR 84/D/O/2001 STATUS TERAKREDITASI BAN-PT.DIKTI
Jalan : Achmad Nadjamuddin No.17 Telp/Fax.(0435) 829975 Kota Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI
No. 020/SRP/FE-UNISAN/IV/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Musafir, SE., M.Si
NIDN : 092811690103
Jabatan : Dekan

Dengan ini menerangkan bahwa

Nama Mahasiswa : Anggi Mustapa
NIM : E1121018
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Judul Skripsi : Analisis Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah
Pada Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Bone
Bolango

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi **Turnitin** untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil *Similarity* sebesar 19%, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendeteksian Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujikan. Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Gorontalo, 14 April 2025
Tim Verifikasi,

Nurhasmi, S.KM

Mengetahui
Dekan,

DR. Musafir, SE., M.Si
NIDN. 0928116901

Terlampir : Hasil Pengecekan Turnitin

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Personal Data

Nama : Anggi Mustapa
Tempat, Tanggal Lahir : Gorontalo, 20 Juni 2003
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Prov. Gorontalo, Kab. Bone Bolango, Kec. Bulango Timur
Email : anggimstpa20@gmail.com



Riwayat Pendidikan

2009-2016 : SDN 1 Bulango Timur
2016-2018 : SMP Negeri 1 Bulango Timur
2018-2021 : SMA Negeri 1 Tapa
2021-2025 : Universitas Ichsan Gorontalo